



DIGITALISASI

UNTUK REFORMASI HUKUM





DIGITALISASI

UNTUK REFORMASI HUKUM

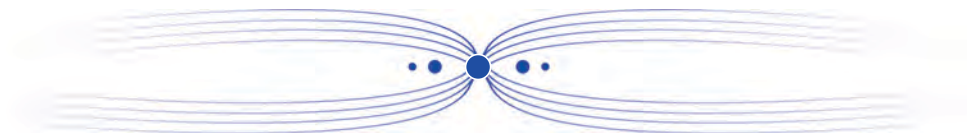
“

JDIH Marves

hadir sebagai sarana penyampaian informasi hukum yang mampu menyajikan secara lengkap dari tahap perencanaan peraturan perundang undangan, tahapan pembahasan rancangan, lacak usulan rancangan, penyebarluasan peraturan, dan fasilitas layanan bantuan hukum serta **JDIH Marves** kini sudah bisa di download di play store dan app store

Budi Purwanto

”





Prestasi yang diraih

JDIH Marves

JDIH
AWARDS
2021

Peringkat terbaik ke V
tingkat Kementerian

5

Tahun 2021 **JDIH Marves** berhasil memperoleh prestasi sebagai JDIH terbaik ke V tingkat Kementerian, keberhasilan ini menjadi motivasi untuk dapat terus melakukan perbaikan dan perubahan yang lebih baik lagi kedepannya sehingga **JDIH Marves** nantinya bisa memperoleh peringkat ke I tingkat Kementerian.



DAFTAR ISI

07	Organisasi JDIH Marves
13	Sumber Daya Manusia
21	Koleksi Dokumen Hukum
37	Teknis Pengelolaan
45	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
53	Sarana dan Prasarana
59	Kegiatan Pengelolaan JDIH
71	Inovasi Pengelolaan JDIH
83	Permasalahan dan Kendala yang dihadapi
97	Fitur JDIH Marves



Visi dan Misi JDIH Marves



Visi



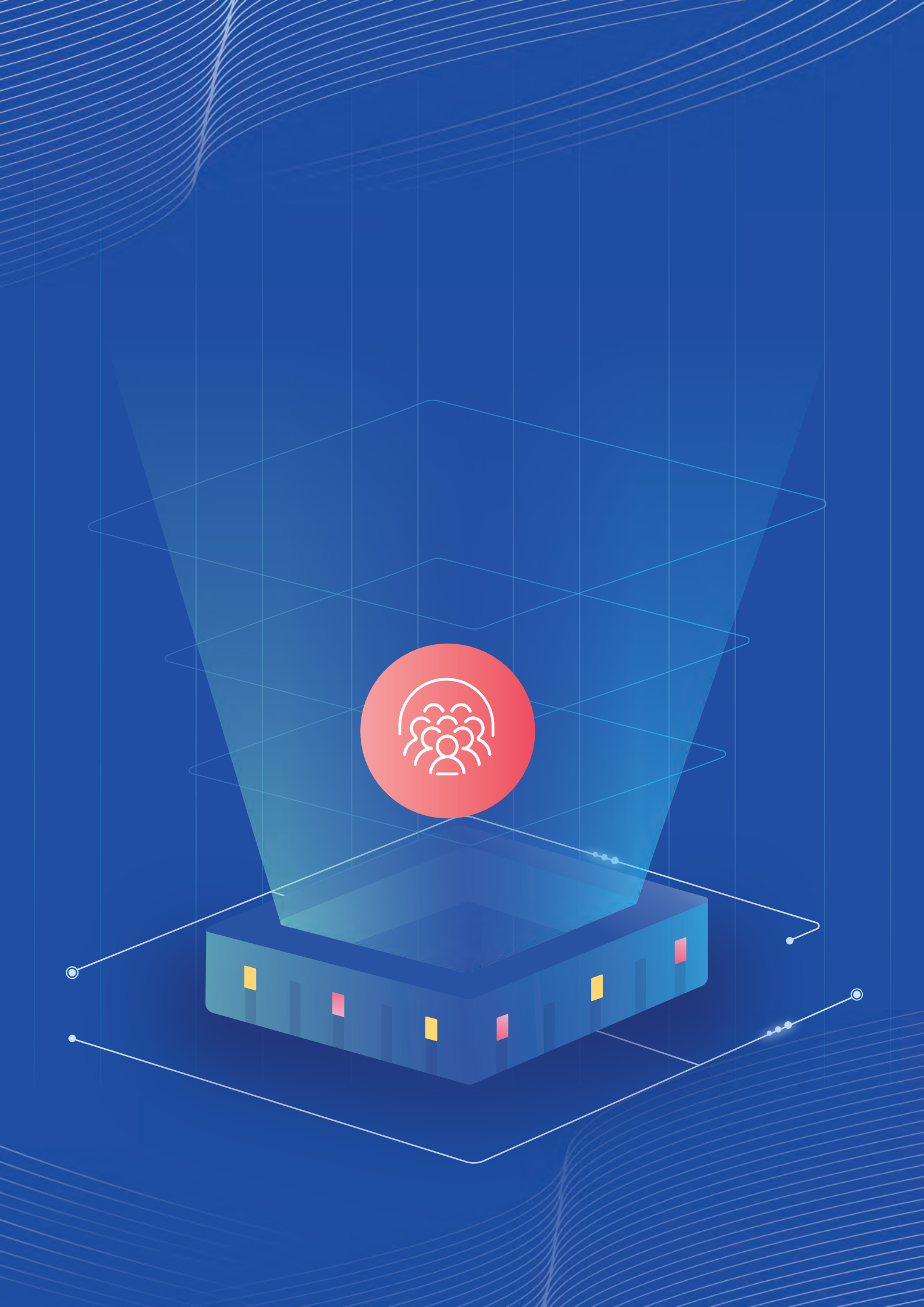
Terwujudnya dokumentasi dan informasi hukum di bidang kemaritiman dan investasi yang lengkap, akurat, mudah dan cepat dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi.





Misi

1. Meningkatkan kelengkapan dokumen hukum di bidang kemaritiman dan informasi hukum
2. Mengoptimalkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi
3. Meningkatkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang kemaritiman dan investasi
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum





ORGANISASI JDIH MARVES

Informasi mengenai JDIH Marves

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut JDIH Marves merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kemaritiman dan investasi, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Unit yang mengelola JDIH Marves adalah Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Advokasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum.

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 119/S Tahun 2020 tentang Tim Kerja Penyusunan Pedoman dan Integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

STRUKTUR ORGANISASI

BIRO HUKUM

Struktur organisasi Biro Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai berikut:



KARO HUKUM
BUDI PURWANTO



KABAG PPP
RIMA ERYANI



KABAG ADV & INFOKUM
KURNIAWAN B . P R IANTO

KASUB BAG ADVOKASI HUKUM
ANDRI HAVIANA

KASUB BAG DOK DAN INFOKUM
RYAN PASCA PRATAMA

KASUB BAG TATA USAHA
MARIA GENOVEVA BEKU

KABAG KE RJA SAMA
M. REZA RAZAK

KASUB BAG KERJA SAMA DALAM NEGERI
DEWA NGAKAN NYOMAN

KASUB BAG KERJA SAMA LUAR NEGERI
-

KABAG ORTALA DAN RB
IWA GEMINO

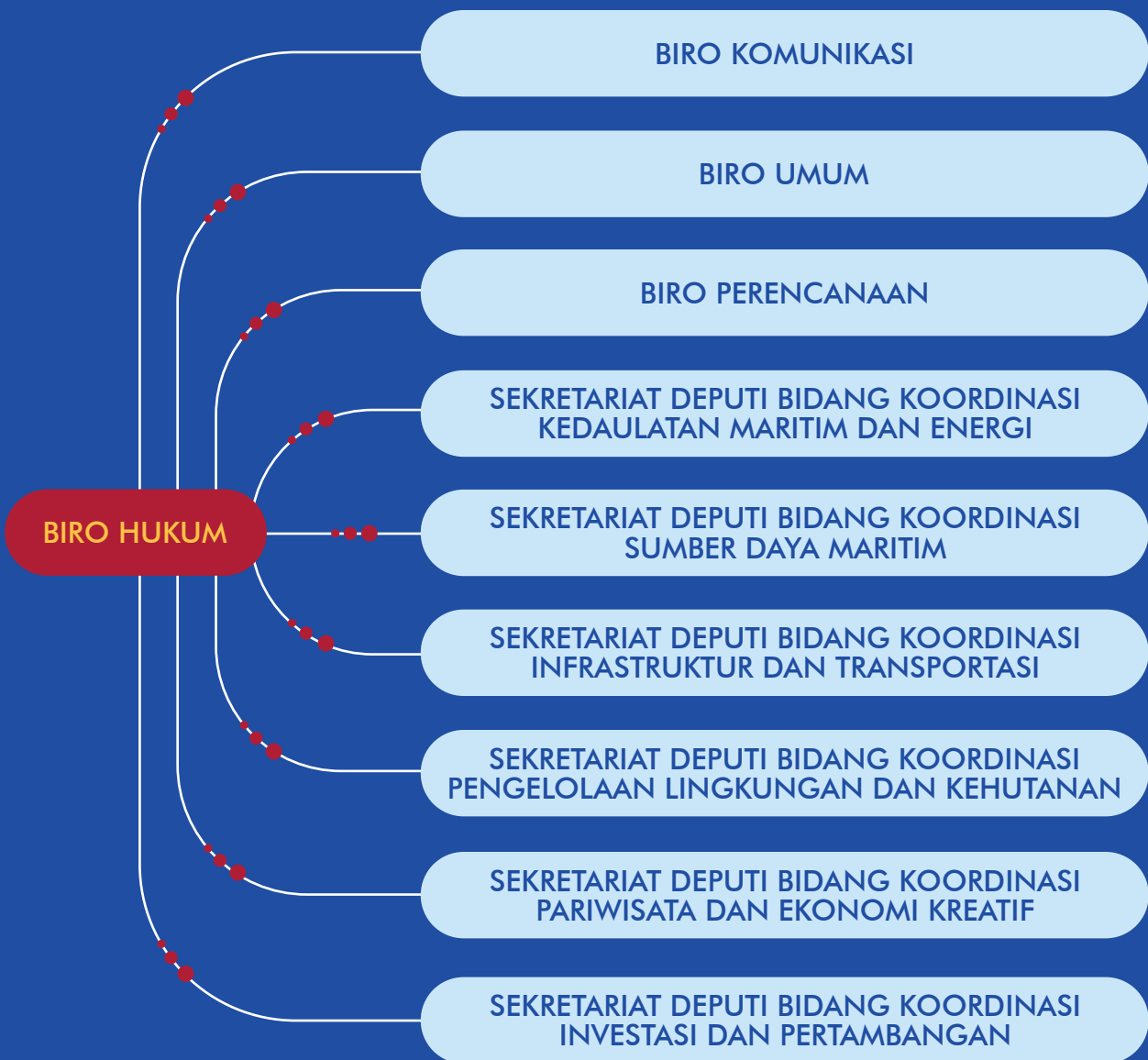
KASUB BAG TATA LAKSANA
-

KASUB BAG ORGANISASI
LAILUN MAULIDIYAH

KASUB BAG PENGELOLAAN RB
J.A. MAULIDAN

STRUKTUR PENGELOLA JDIH KEMENKO MARVES

Struktur organisasi Pengelola JDIH Kemenko Marves berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi, sebagai berikut:









SUMBER DAYA MANUSIA

Data informasi SDM yang mengelola JDIH Marves

JDIH Marves menjadi struktur organisasi pada tahun 2019 bulan Mei yaitu pada saat terjadi perubahan struktur organisasi Biro Hukum.

Sebelum terjadinya perubahan struktur tersebut, JDIH dikelola oleh anggota tim JDIH yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelola Konten Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Jumlah personil yang mengelola JDIH Marves saat ini hanya terdiri dari Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum, Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum dan 1 (satu) staf pendukung Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Jika dilihat dari jumlah yang mengelola JDIH Marves dapat dikatakan sangat sedikit, namun kondisi tersebut tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH.

Kegiatan pengembangan SDM yang telah dilaksanakan JDIH Marves selama tahun 2021 yakni 1) bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan hukum oleh Pustakawan BPHN; 2) bimbingan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh JDIHN; 3) pendampingan dalam pencatatan, penyusunan dan pengarsipan buku hukum; 4) bimbingan teknis penyusunan laporan tahunan JDIH Marves; 5) Studi banding dengan JDIH Kementerian Keuangan; 6) Studi banding dengan JDIH BIG; 7) Studi banding dengan JDIH Kota Batam

Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dalam hal mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mempublikasikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum diperlukan pengembangan aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Untuk itu maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 30/S Tahun 2021 tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 37/S Tahun 2021. Dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

PENGARAH

1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM

PENANGGUNG JAWAB

1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kepala Biro Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

KETUA

Plt. Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

SEKRETARIS

Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;



ANGGOTA

1. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan , Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha, Bagian Advokasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Kepala Subbagian Perancang Peraturan Perundang-undangan I, Bagian Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Kepala Subbagian Perancang Peraturan Perundang-undangan ii, Bagian Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Kepala Subbagian Perancang Peraturan Perundang-undangan iii, Bagian Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
6. Kepala Subbagian Sistem Informasi, Data dan Sistem Informasi, Biro Komunikasi;
7. Rizka Paramitha Eka Oktarina, Analisis Sistem Informasi Data dan Sistem Informasi, Biro Komunikasi, Sekretariat Kementerian Koordinator;
8. Vincentius Dhanang Widhianto, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum, Sekretariat Kementerian Koordinator;
9. Mifta Hanifah, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Sekretariat Kementerian Koordinator;
10. Anna Marlia Nurjanah, Penyusun Bahan Kebijakan, Biro Hukum, Sekretariat Kementerian Koordinator;
11. Aliwidi Maulana, Analis Sistem Informasi, Biro Komunikasi, Sekretariat Kementerian Koordinator;
12. Nanda Manarfa Az Zahra, Staf Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum;
13. Raturifa Hafani, Staf Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum;
14. Gina Nafsah Savira, Staf Subbagian Advokasi Hukum, Biro Hukum;
15. Beni Yogas, Staf Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum.



Budi Purwanto

Kepala Biro Hukum

Pangkat/Gol. Ruang

Pembina Utama Madya/IV.d

Kewarganegaraan

Indonesia

Pendidikan

S2 Ilmu Hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM"

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Biro Hukum
- Asdep Hukum dan Perjanjian Maritim
- Kabag Hukum dan Kerja Sama
- Kasubbag Peraturan Transportasi Udara
- Kasubbag Multilateral
- Kasubbag Kerja Sama Multilateral
- Kasubbag Rancangan III

Kurniawan B. Prianto

Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum

Pangkat/Gol. Ruang

Pembina/IV.a

Kewarganegaraan

Indonesia

Pendidikan

- S2 Manajemen Informatika
- S1 Perbankan
- S1 Hukum Perdata

Universitas Gunadarma
Universitas Gunadarma
Universitas Borobudur

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum 2019-sekarang
- Kepala Bagian Hukum dan Organisasi 2015-2019
- Satuan Tugas Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan 2015
- Satuan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 2010-2015

Ryan Pasca Pratama

Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pangkat/Gol. Ruang

Penata/III.c

Kewarganegaraan

Indonesia

Pendidikan

S2 Ilmu Administrasi
D4 Politik Pemerintahan

STIA LAN
IPDN

Riwayat Pekerjaan

Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
Sekretaris Pimpinan Sesmenko
Analisis Pembangunan Desa

2019-sekrang
2016-2019
2014-2016

Nanda Manarfa Az Zahra

Pelaksana Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kewarganegaraan

Indonesia

Pendidikan

S1 Sistem Informasi

Universitas Gunadarma

Riwayat Pekerjaan

Pelaksana Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
Pelaksana Bagian Data dan Sistem Informasi, Kemenko Bidang Kemaritiman
PT. Grab Taxi Indonesia - Grab For Business

2019-sekarang
2018-2019
2017-2018

ANGGARAN JDIH

Jumlah anggaran pengelolaan JDIH Tahun Anggaran 2021

JDIH Marves tahun anggaran 2021 memiliki anggaran sebesar Rp.500.000.000,- dimana komponen utama dari anggaran tersebut yaitu:

- Pengembangan website JDIH Marves;

- Pembuatan aplikasi mobile JDIH berbasis android dan iOS;

- Pembuatan videografis dan infografis;

- Rapat perencanaan, monitoring, evaluasi dan pembinaan serta peningkatan sumber daya manusia dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum;



Pengembangan Sistem Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; ●

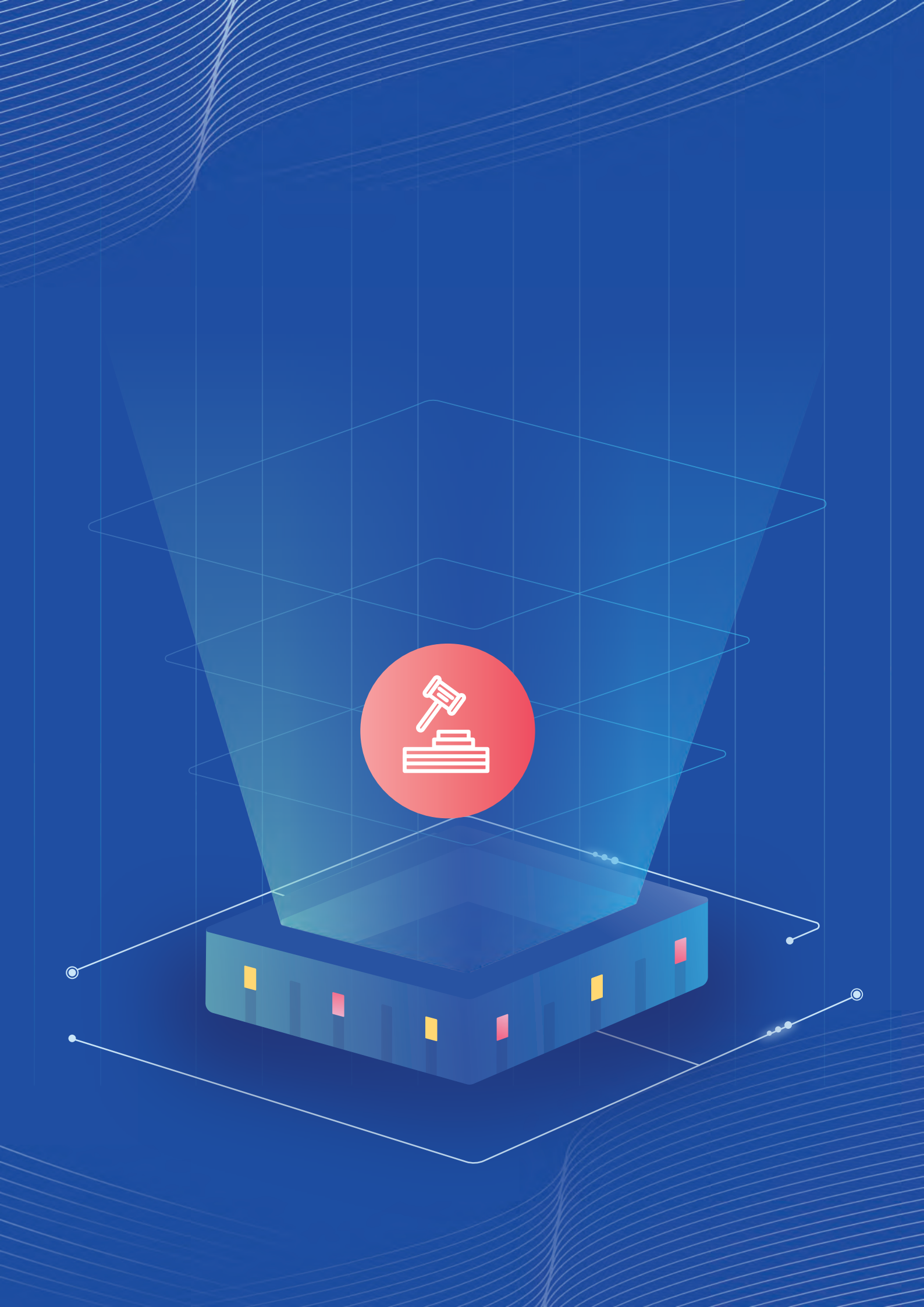
Penyediaan Informasi Hukum; ●

Sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan; ●

Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Kemenko Marves; ●

Koordinasi Pengelolaan JDIH ●







KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

Jumlah ragam dan bentuk koleksi yang dimiliki antara lain jumlah koleksi yang dimiliki baik koleksi fisik maupun yang telah diunggah dalam aplikasi website **JDIH Marves**.



Peraturan Tingkat Pusat

Jenis dan Jumlah Peraturan di tingkat Pusat



Peraturan Di lingkungan Kemenko Marves

Jenis dan Jumlah Peraturan di lingkungan Kemenko Marves

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)	(2)
CUSTOMER PERSPECTIVE	
1.	JDIHN Award Tahun 2021
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE	
1.	JPersentase pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kemenko Marves yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat

INFORMASI HUKUM, BIRO HUKUM SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

	JUDUL KINERJA/ HASIL KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			(3)	(4)	(5)	
			I	II	III	IV
	3 Besar Terbaik Tingkat Kementerian	3				3
	Persentase Peraturan Menteri Koordinator Tahun 2021 yang diupload di website dan aplikasi mobile JDIH	100%				100%
	Persentase Peraturan Menteri Koordinator Tahun 2021 yang disajikan dalam tampilan video motion grafis dan/atau informasi grafis	100%				100%
	Persentase Peraturan Menteri Koordinator Tahun 2021 yang disajikan dalam berita hukum	100%				100%
	Jumlah Peraturan Menteri Koordinator Tahun 2015-2021 yang disajikan dalam versi bahasa inggris	3				3
	Jumlah tayang Podcast Marves program Tanya Hukum	8	2	2	2	2
	Jumlah pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum versi ke 3	1				1
	Jumlah pengembangan Aplikasi Mobile Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum versi ke 2	1				1
	Jumlah pengembangan SDM pengelolaan JDIH Marves (Bimbingan Teknis)	1				1
	Jumlah penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum	6				6
	Jpengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum	1			1	
	Jumlah laporan pelaksanaan JDIH	1				1

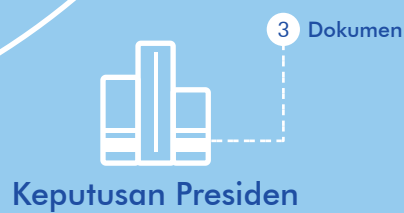
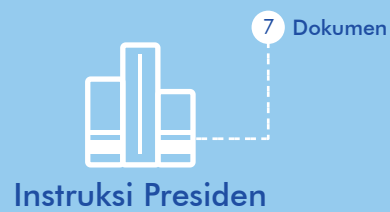
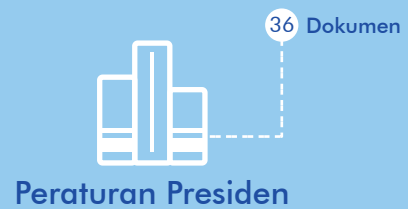
Jakarta, Januari 2021
Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

Ryan Pasca Pratama

Peraturan Tingkat Pusat

Jenis dan Jumlah Peraturan di tingkat Pusat

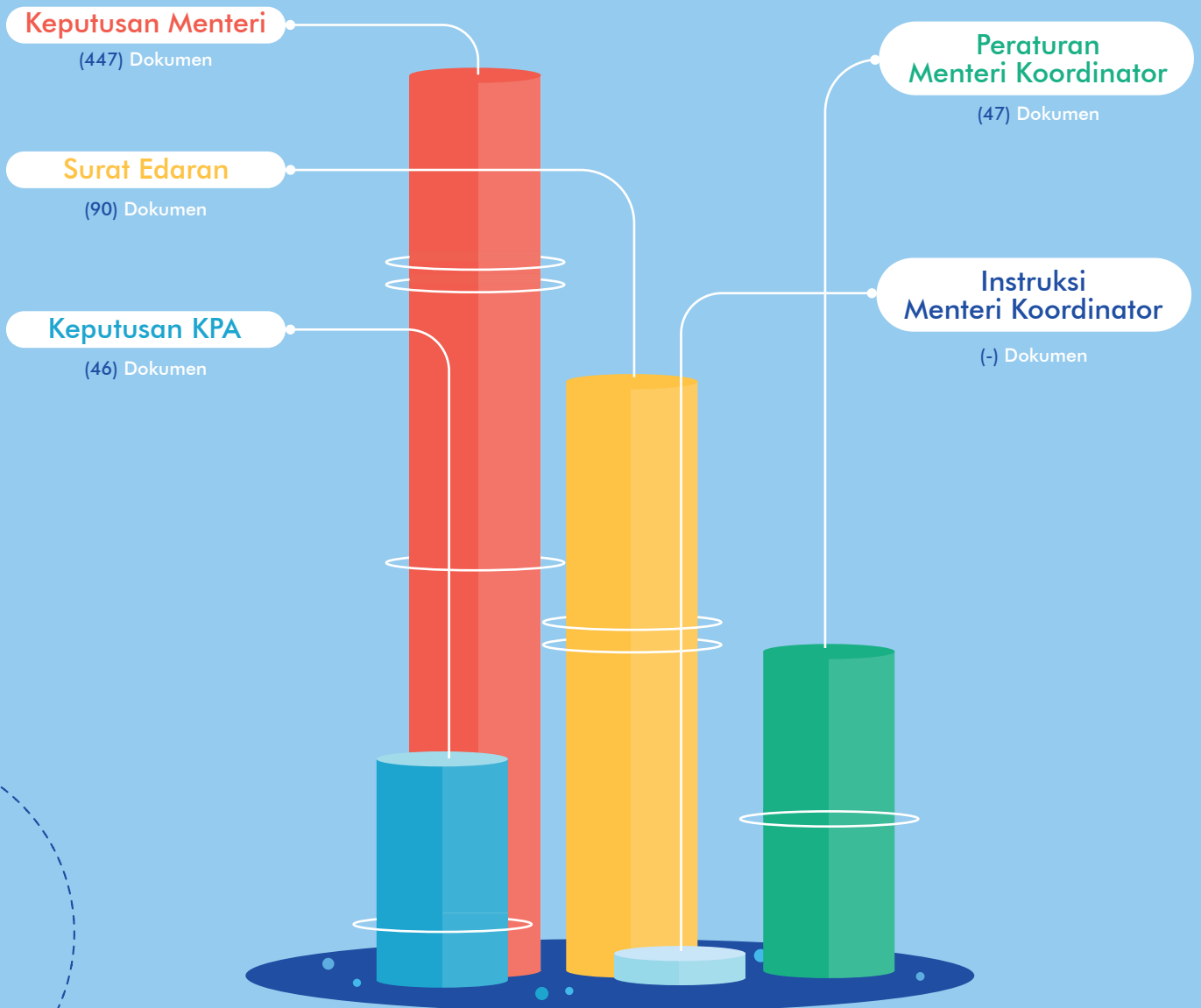
Tingkat Pusat



● Jumlah Dokumen
191

Peraturan di lingkungan Kemenko Marves

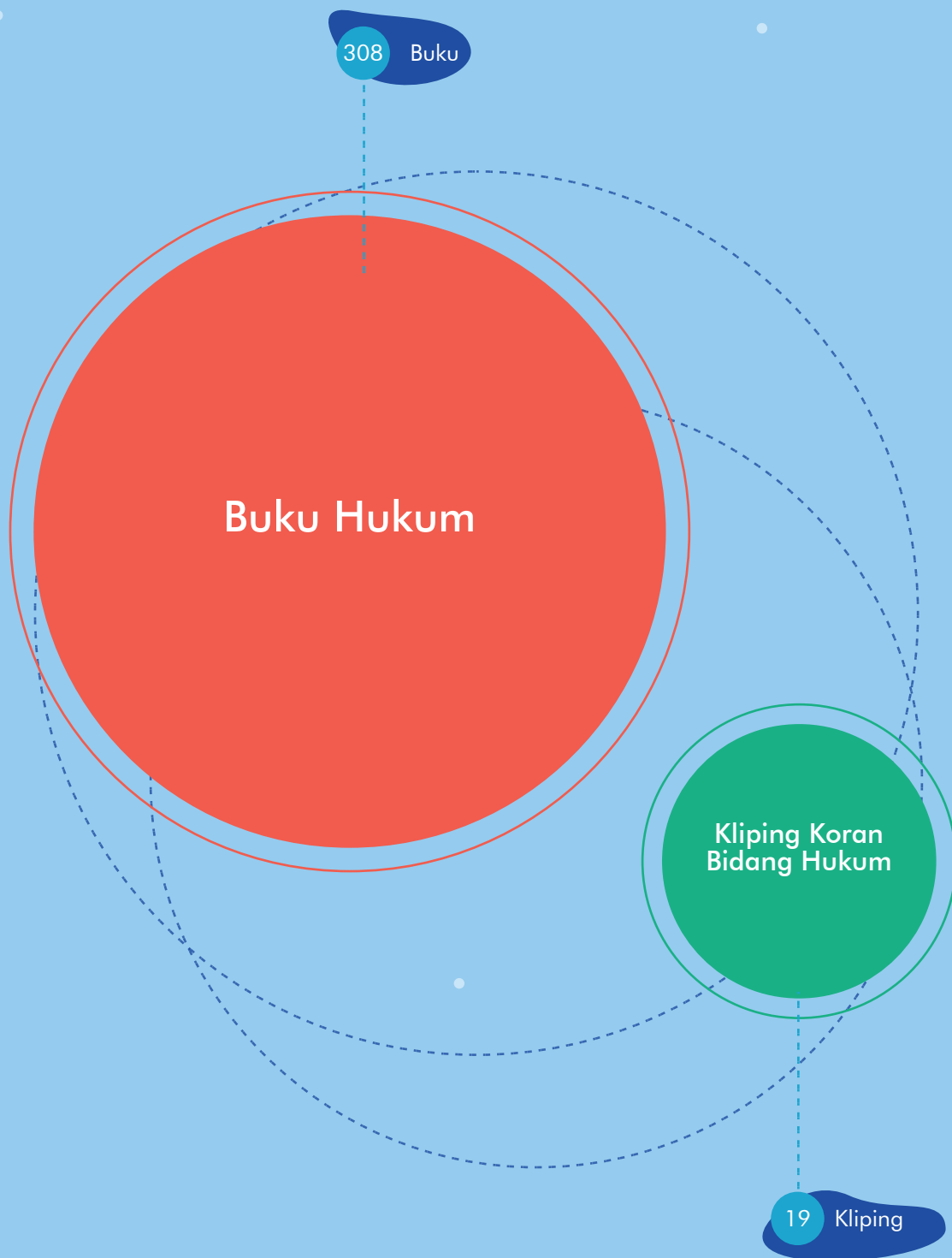
Jenis dan Jumlah Peraturan di lingkungan Kemenko Marves



● Jumlah Dokumen
1260

Kliping Koran Bidang Hukum dan Buku Buku Hukum

Jumlah Kliping Koran Bidang Hukum dan Buku-buku Hukum



35 Kumpulan Tema Peraturan

Untuk memberikan kemudahan dalam mencari peraturan di JDIH Marves telah disediakan tema peraturan yang dapat memberikan kemudahan dalam memahami isi suatu peraturan secara komprehensif



Buka Halaman
Selanjutnya

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk memberikan kemudahan dalam mencari peraturan JDIH Marves telah menyediakan tema lingkungan hidup dan kehutanan

- **Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**
80 Peraturan
- **Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**
80 Peraturan
- **DAS dan Hutan Lindung**
80 Peraturan
- **Sampah, Limbah dan B3**
80 Peraturan
- **Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**
80 Peraturan
- **Pengendalian Perubahan Iklim**
80 Peraturan



Perhubungan

Untuk memberikan kemudahan dalam mencari peraturan JDIH Marves telah menyediakan tema perhubungan

- **Perkeretaapian**
80 Peraturan
- **Perkapalan**
80 Peraturan
- **Pelayaran**
- **Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas**
- **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
- **Penerbangan**



Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk memberikan kemudahan dalam mencari peraturan JDIH Marves telah menyediakan tema perhubungan

- **Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi**
80 Peraturan
- **Panas Bumi**
80 Peraturan
- **Ketenaganukliran**
80 Peraturan
- **Ketenagalistrikan**
80 Peraturan
- **Mineral dan Batubara**
80 Peraturan
- **Minyak dan Gas**
80 Peraturan



Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk memberikan kemudahan dalam mencari peraturan JDIH Marves telah menyediakan tema perhubungan

- **Sumber Daya Air**
80 Peraturan
- **Perumahan**
80 Peraturan
- **Jalan Tol**
80 Peraturan
- **Penyelenggaraan Jalan**
80 Peraturan
- **Jasa Konstruksi**
80 Peraturan
- **Cipta Karya**
80 Peraturan



Kelautan dan Perikanan

Untuk memberikan kemudahan dalam mencari peraturan JDIH Marves telah menyediakan tema perhubungan

- **Pelabuhan Perikanan**
80 Peraturan
- **Kapal Perikanan**
80 Peraturan
- **Alat Penangkapan Ikan**
80 Peraturan
- **Perizinan dan Kenelayanan**
80 Peraturan
- **Perikanan Budidaya**
80 Peraturan
- **Pengawasan Sumber Daya Kelautan**
80 Peraturan
- **Daya Saing Produk Kelautan**
80 Peraturan



Penanaman Modal

Untuk memberikan kemudahan dalam mencari peraturan JDIH Marves telah menyediakan tema perhubungan

- **Izin Usaha**

80 Peraturan



Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Untuk memberikan kemudahan dalam mencari peraturan JDIH Marves telah menyediakan tema perhubungan

- **Destinasi Pariwisata**
80 Peraturan
- **Kelembagaan Pariwisata**
80 Peraturan
- **Ekonomi Kreatif**
80 Peraturan

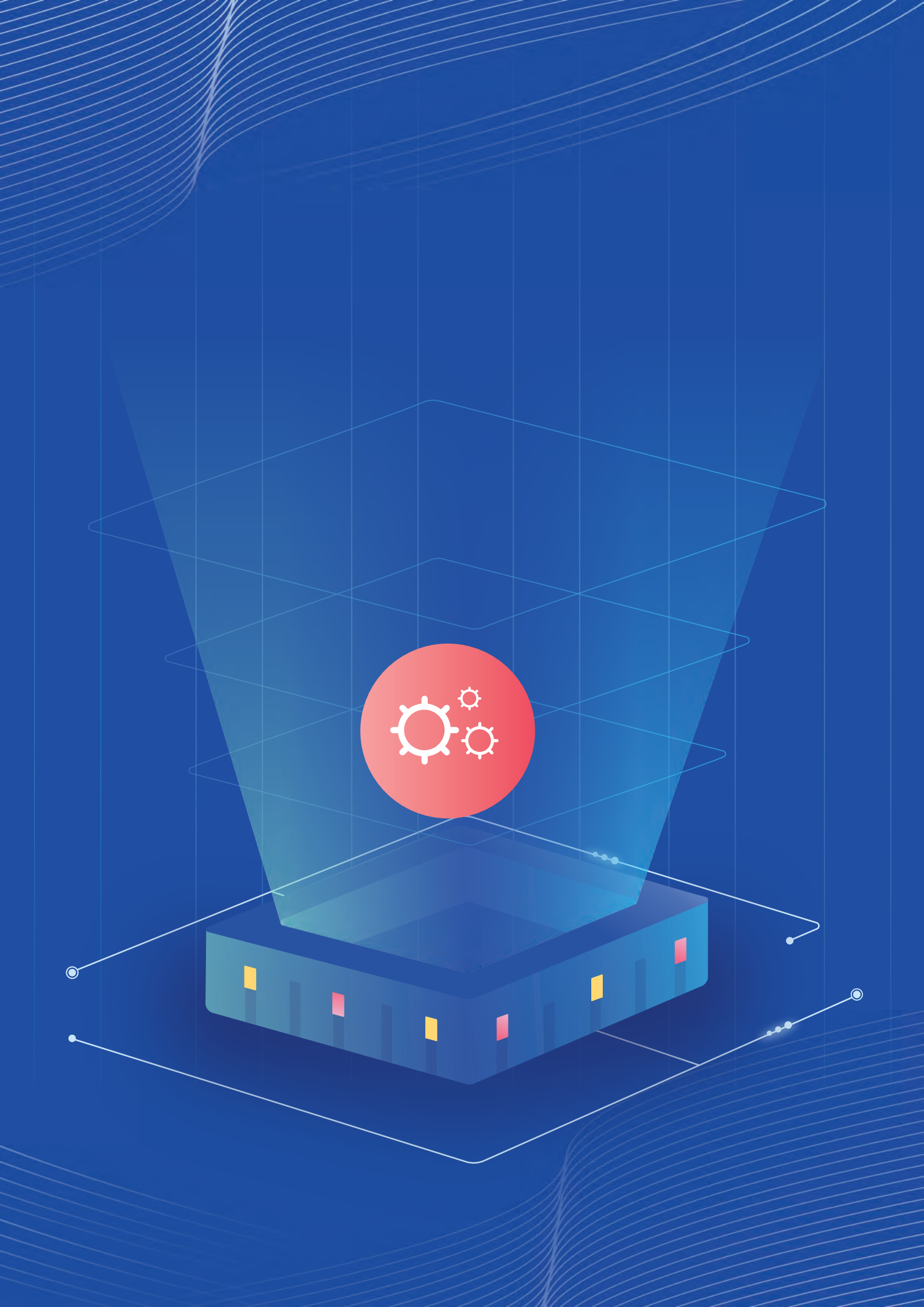




KOLEKSI INFORMASI HUKUM

Berbagai jenis informasi hukum yang dikelola oleh JDIH Marves, antara lain:

- Monografi Hukum
- Jurnal Hukum
- Videografis Peraturan
- Infografis Peraturan
- Kliping Hukum





TEKNIS PENGELOLAAN

Penerapan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum

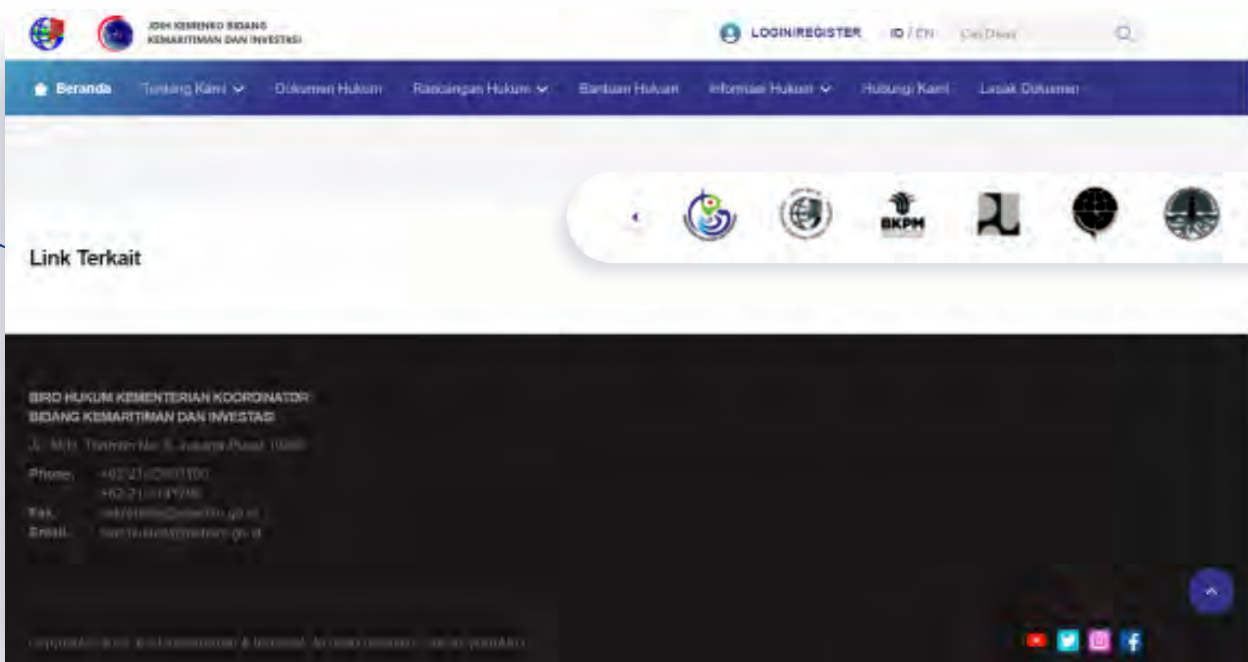
Dalam rangka mengembangkan pengelolaan JDIH Marves, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah membuat standar pengelolaan JDIHN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Standar tersebut dijadikan pedoman dalam pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi JDIH Marves. Berikut penyesuaian standar yang telah diatur di dalam website JDIH Marves, antara lain:

1. Penyesuaian standar website JDIH

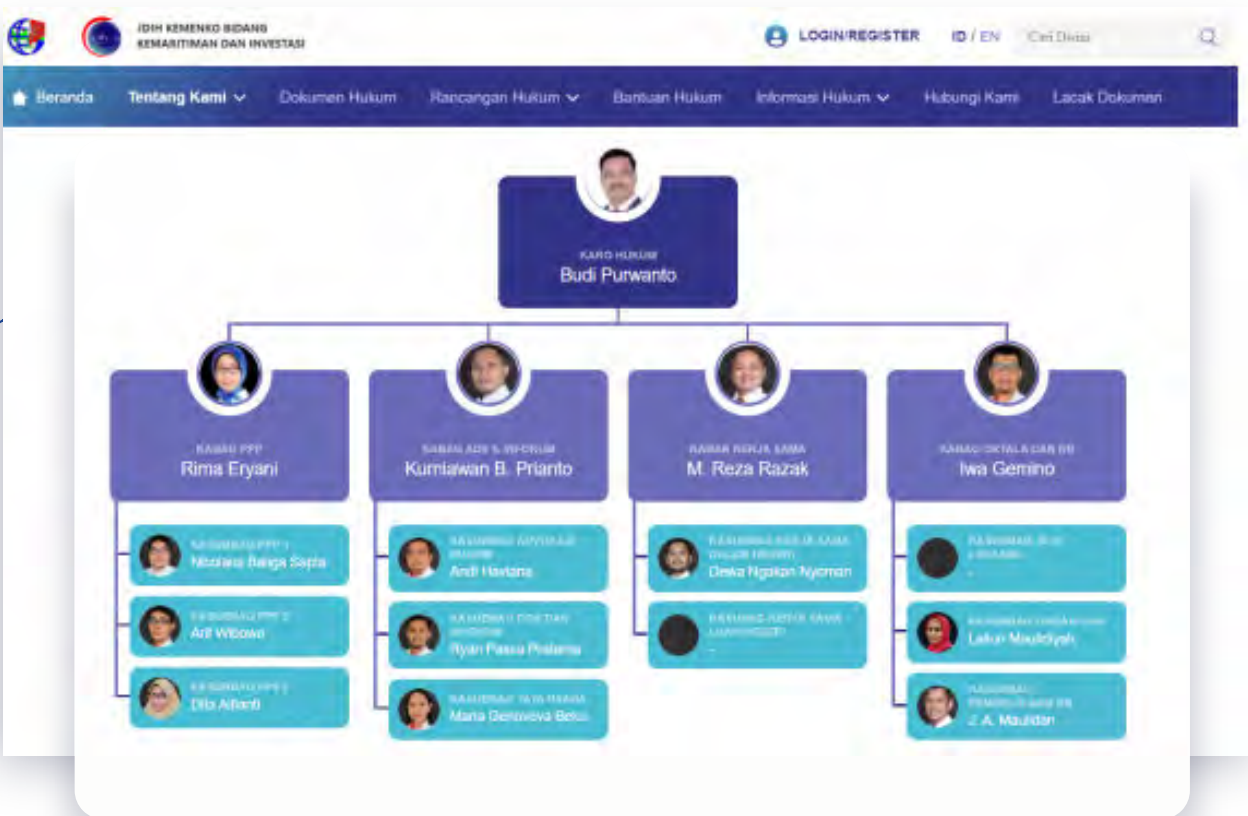
- Alamat website (domain name) merupakan subdomain dari website utama instansi:
<https://jdih.maritim.go.id/>
- Membuat logo JDIHN di pojok kiri atas layar



c. Menampilkan daftar link /alamat website anggota jaringan yang ada di bawah instansinya



d. Struktur Organisasi Pengelola JDIH



e. Alamat dan Kontak Person Pengelola JDIH



Hubungi Kami

Hubungi Kami

Jika anda mengalami kesulitan dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan saran anda yang positif sangat bermanfaat bagi perubahan dan kemajuan kami

Nama*

Masukkan Nama Anda

Email*

Masukkan Email Anda

Telepon*

Masukkan Telepon Anda

Pesan*

Tuliskan Pesan Anda

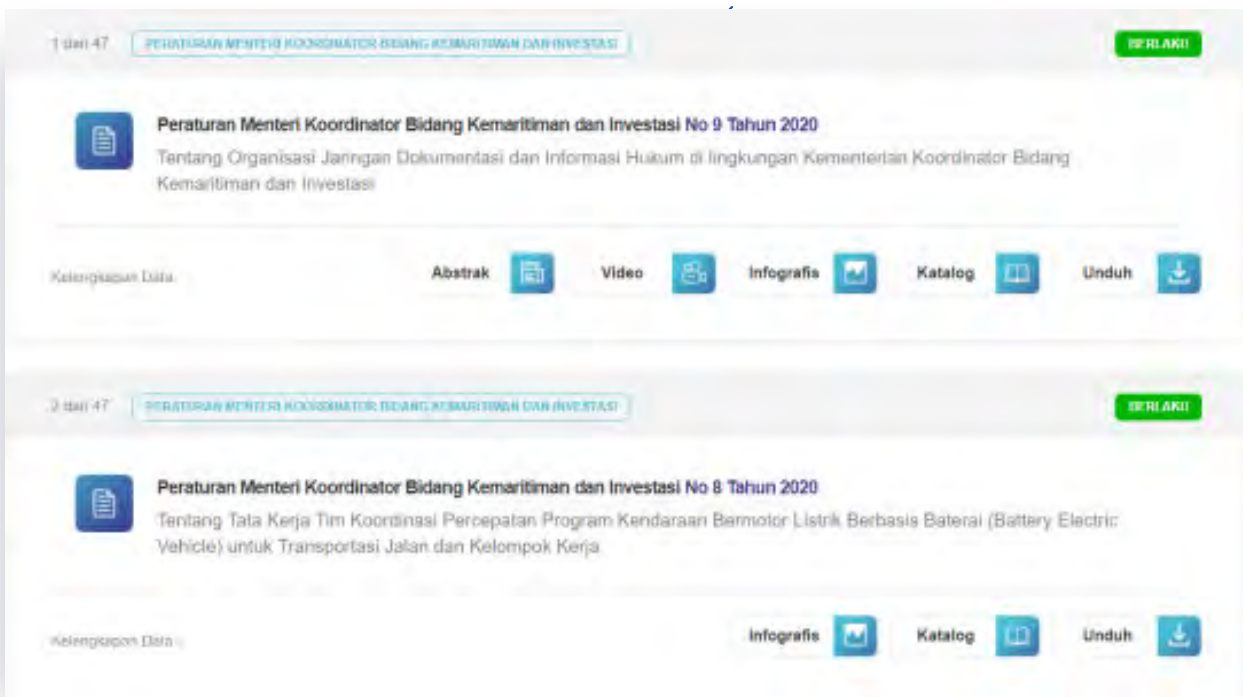
Saya bukan robot



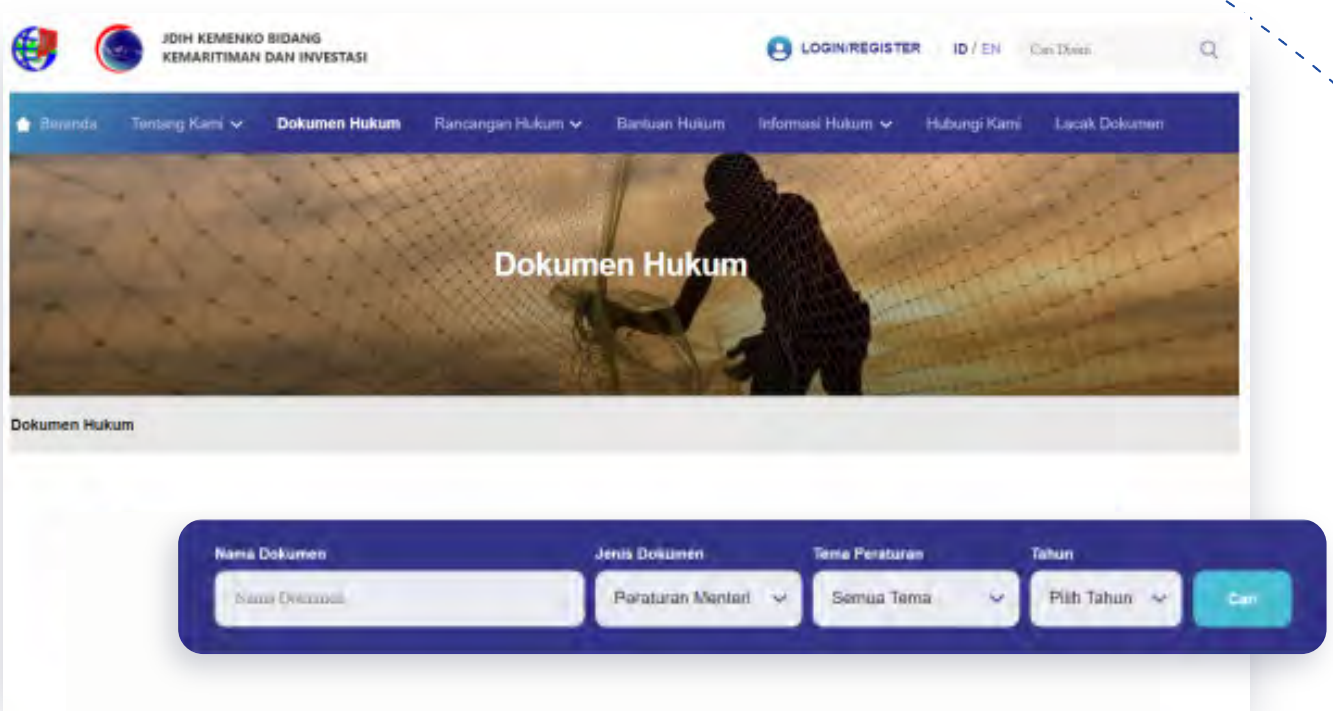
KIRIM PESAN



f. konten/isi dalam aplikasi harus berisi Dokumen Hukum



g. penelusuran (search engine)



h. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pemanfaatan aplikasi JDIH



2. Standar Metadata

a. Standar Metadata Peraturan yang digunakan:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi No 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	
Lembar Kerja Peraturan	
Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-undangan
Judul	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
T.E.U. Badan / Pengarang	Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
No. Peraturan	9 Tahun 2020
Jenis/Bentuk Peraturan	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan	Permenko Bidang Kematriman dan Investasi
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	26 Oktober 2020
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan	2 November 2020
Subjek	Organisasi - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Status Peraturan	Berlaku
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
Bidang Hukum	Hukum Administrasi Negara
Lampiran	-

TUTUP JENDELA

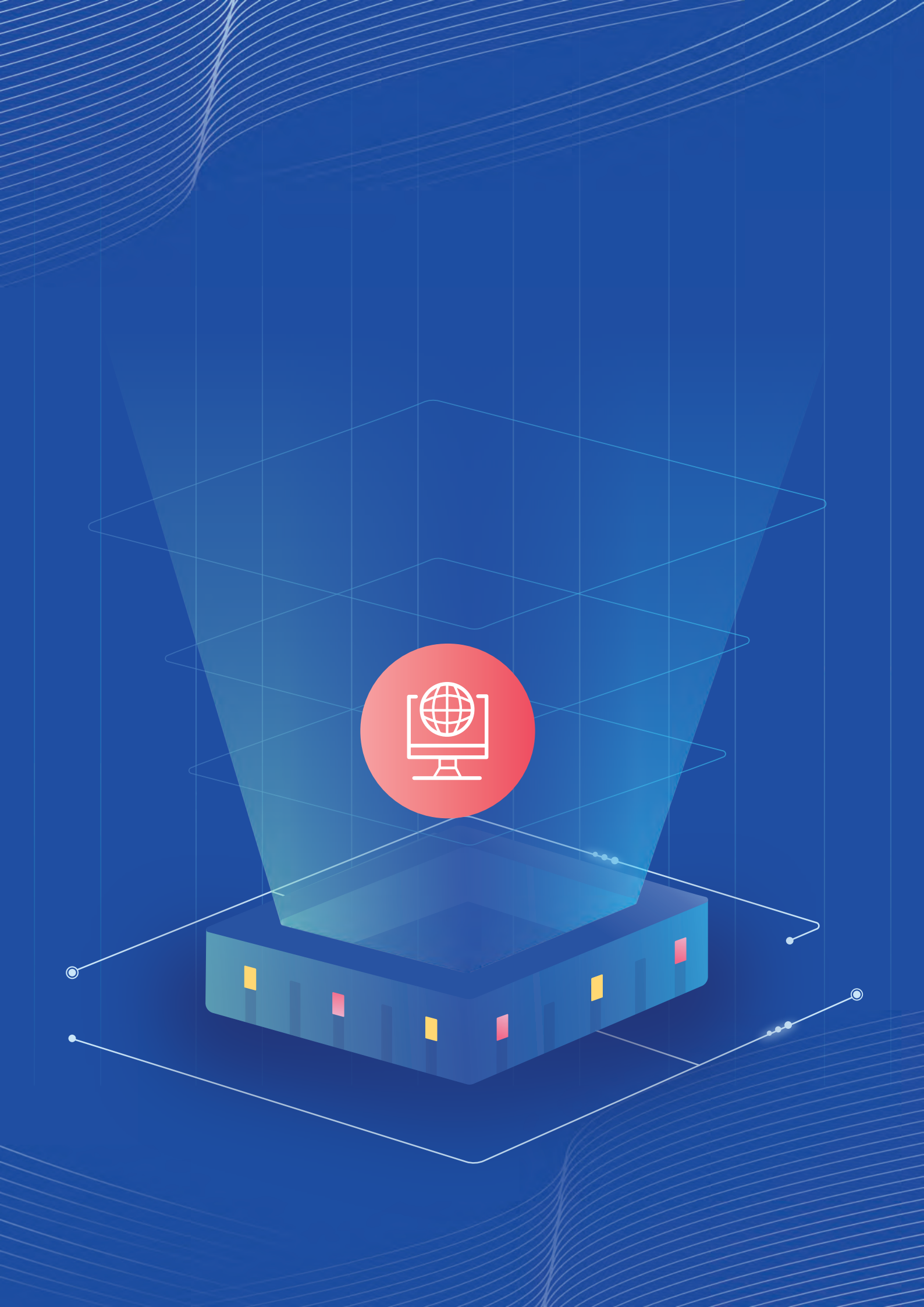
b. Standar Metadata Monografi Hukum yang digunakan:



Selain menerapkan pedoman dokumen dan informasi hukum berdasarkan pedoman yang telah dibuat oleh Pusat Jaringan, **JDIH Marves** juga memiliki SOP pengolah dokumen dan informasi hukum yang diterapkan di lingkungan Kemenko Marves, antara lain:

1. SOP Pelaksanaan Pelayanan Informasi Hukum Terbuka
2. SOP Pelaksanaan Pelayanan Informasi Hukum Tertutup
3. SOP Monitoring Pengelolaan JDIH
4. SOP Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan
5. SOP Pembuatan Katalog Monografi Hukum
6. SOP Pembuatan Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya
7. SOP Penyusunan Indeks Majalah Hukum
8. SOP Pembuatan Indeks Kliping Koran
9. SOP Pembuatan Katalog Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya
10. SOP Pengusulan Pembuatan Videografis
11. SOP Pengusulan Pembuatan Infografis







PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

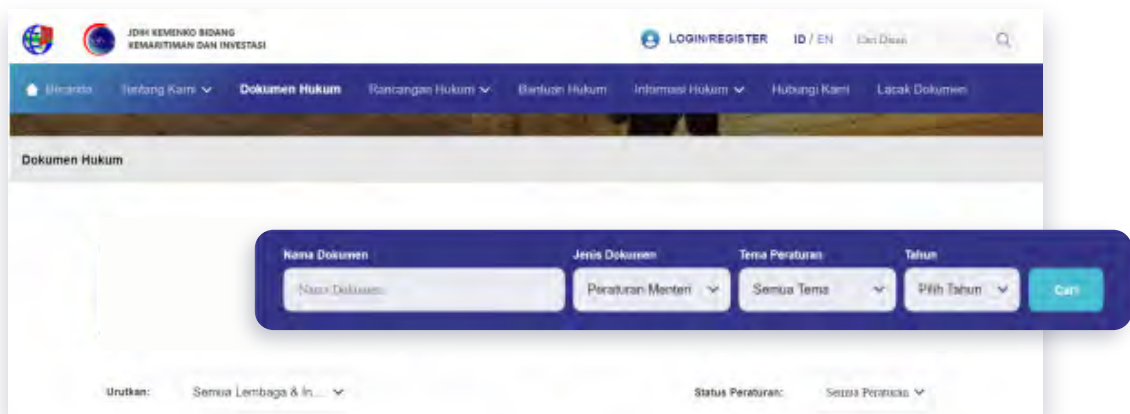
Website JDIH Marves telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, dengan melakukan penambahan fitur fitur yang dapat mempermudah penemuan kembali informasi dan pelayanan informasi hukum.

Dari tampilan beranda JDIH Marves sudah terlihat pada Banner yang ada yaitu fitur pencarian, dari fitur tersebut pencari dokumen dapat menuliskan peraturan apa saja yang sedang ingin dicari tanpa perlu mengetahui secara detail nama dokumen, tahun, ataupun jenis dokumen apa, dengan fitur ini dapat membaca apa saja yang diketik pada kolom pencarian dokumen.

Selain itu juga pada tampilan beranda juga disediakan fasilitas pencarian peraturan terbaru, sehingga melalui beranda awal si pencari informasi dapat mengetahui bahwa ada peraturan terbaru yang telah tersedia

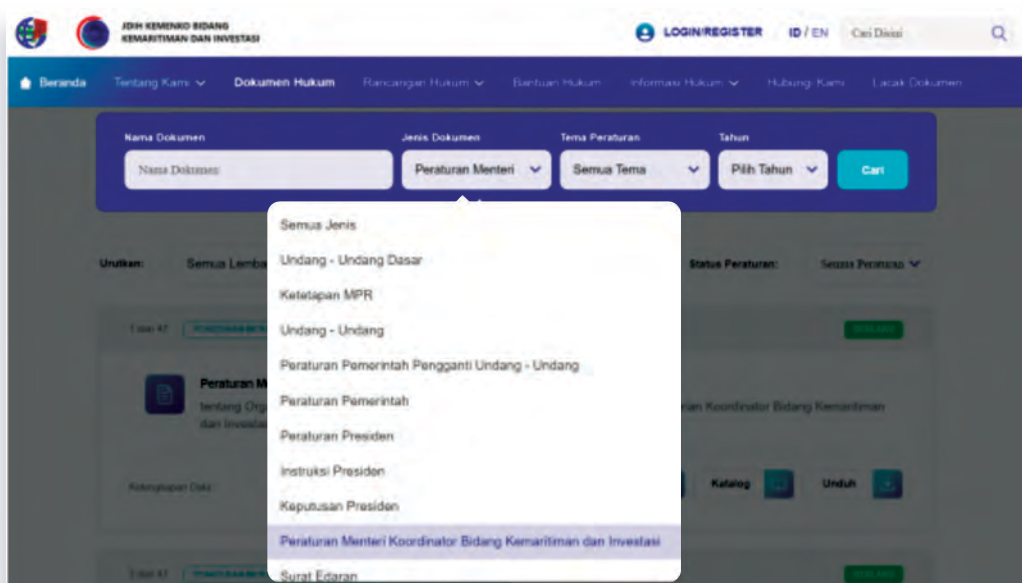
The screenshot shows the homepage of the JDIH Marves website. At the top, there is a header with the logo of the Ministry of Maritime Affairs and Investment, the text 'JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI', and links for 'LOGIN/REGISTER', 'ID / EN', and 'Cari Diisi'. Below the header is a navigation menu with items: 'Beranda', 'Tentang Kami', 'Dokumen Hukum', 'Rancangan Hukum', 'Bantuan Hukum', 'Informasi Hukum', 'Hubungi Kami', and 'Lacak Dokumen'. The main content area features a large banner with the text 'Selamat Datang di JDIH Kemaritiman dan Investasi' and a search bar with the placeholder text 'Cari dokumen / informasi yang kamu inginkan di bawah ini :'. Below the search bar are three dropdown menus labeled 'Jenis Dokumen', 'Bidang', and 'Tahun'. At the bottom of the page, there is a section titled 'Peraturan Terbaru' with two featured items: 'Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 9 Tahun 2020' and 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2020'. Each item has a document icon and a button labeled 'PERATURAN PEMERINTAH'.

Selain pada tampilan Beranda, fitur pencarian dokumen juga tersedia pada fitur Dokumen Hukum. Fitur Dokumen Hukum ini berfungsi untuk mencari semua Dokumen Hukum yang dibutuhkan.



Pencarian dokumen dapat dilakukan dengan menuliskan kata kunci pencarian apa saja yang dapat dituliskan, dan untuk memberikan kemudahan dalam pencarian juga di berikan pencarian berdasarkan jenis dokumen. Jenis dokumen antara lain:

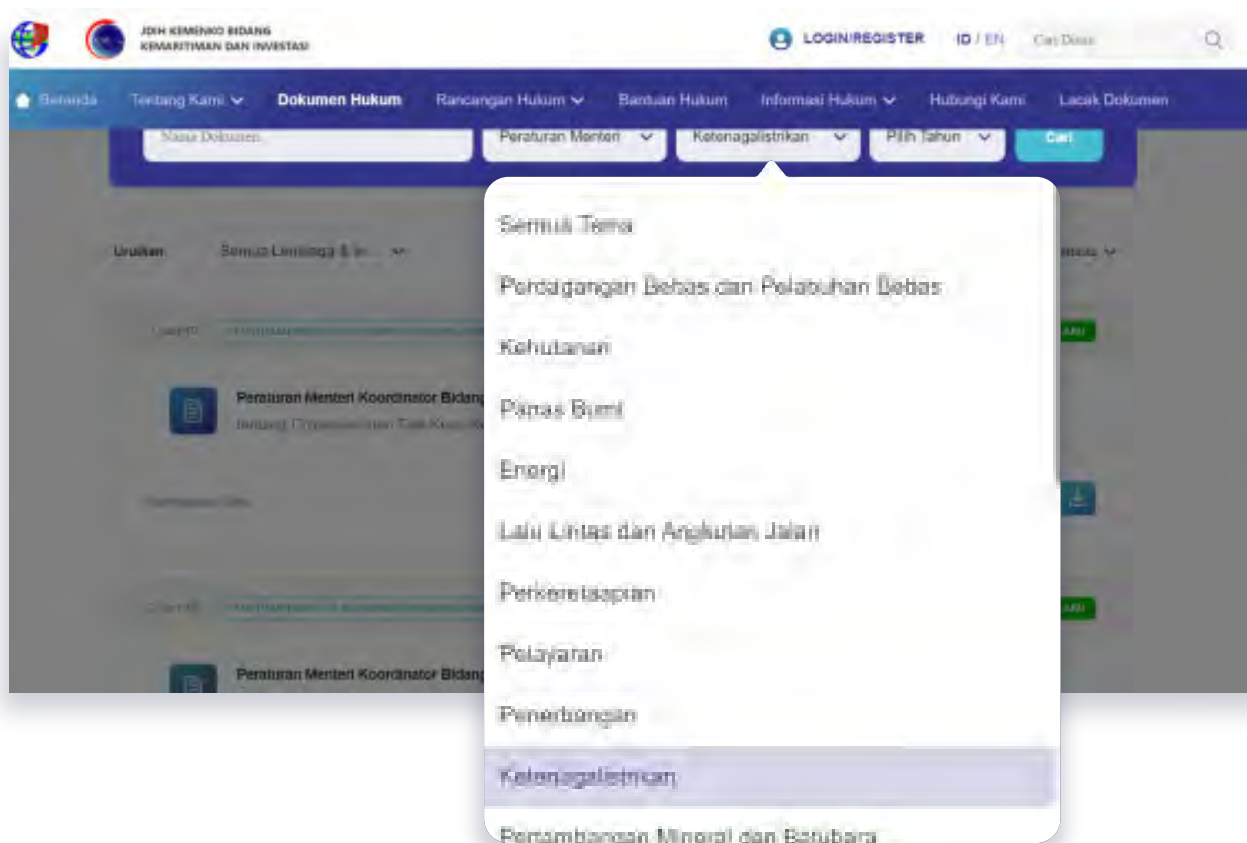
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Presiden
7. Instruksi Presiden
8. Keputusan Presiden
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemeritiman dan Investasi
10. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Kemeritiman dan Investasi
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemeritiman dan Investasi
12. Surat Edaran
13. Putusan Pengadilan
14. Yurisprudensi
15. Naskah Kerja Sama
16. Naskah Akademis
17. Pengumuman



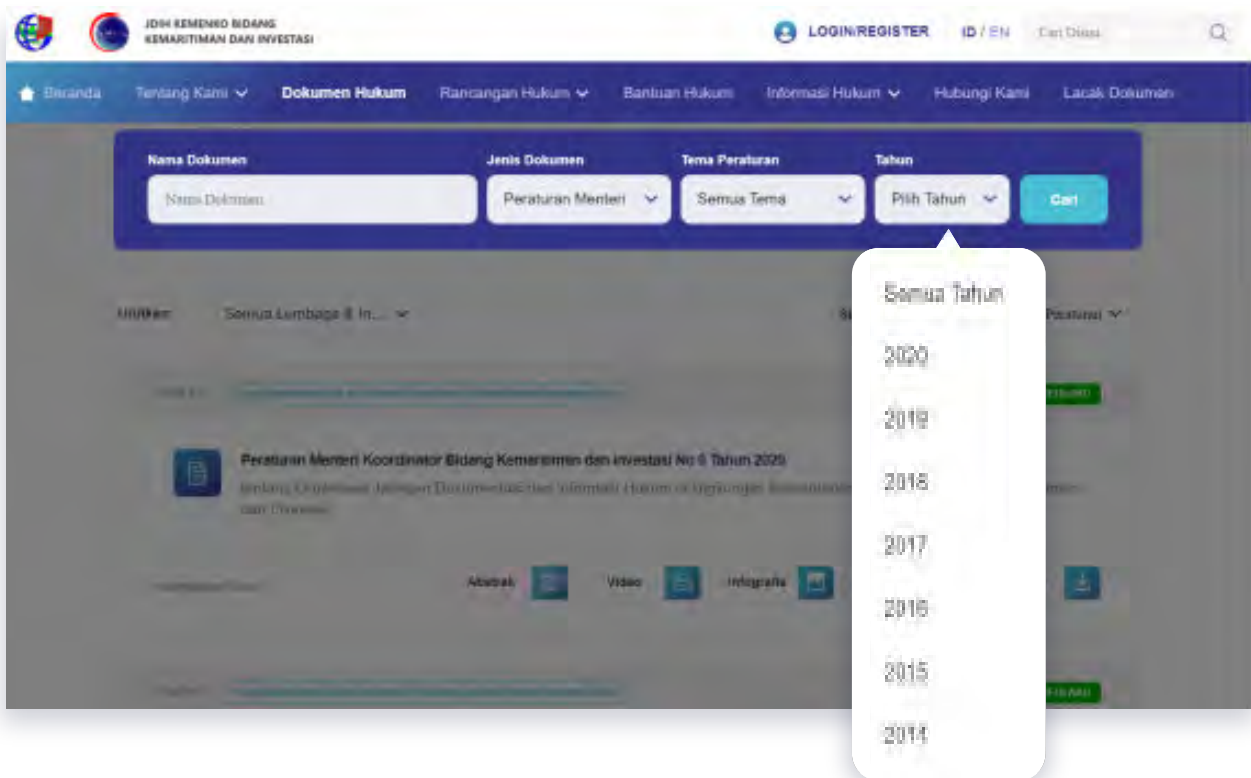
Untuk memberikan kemudahan pencarian dokumen berdasarkan tema, JDIH Marves juga telah menyediakan fitur Tema Peraturan. Tema Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan saat mencari peraturan yang memiliki tema peraturan yang sama sehingga memudahkan untuk melakukan analisis dan evaluasi peraturan sejenis untuk menghindari tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan.

Berikut tema-tema yang telah disediakan di website JDIH, antara lain:

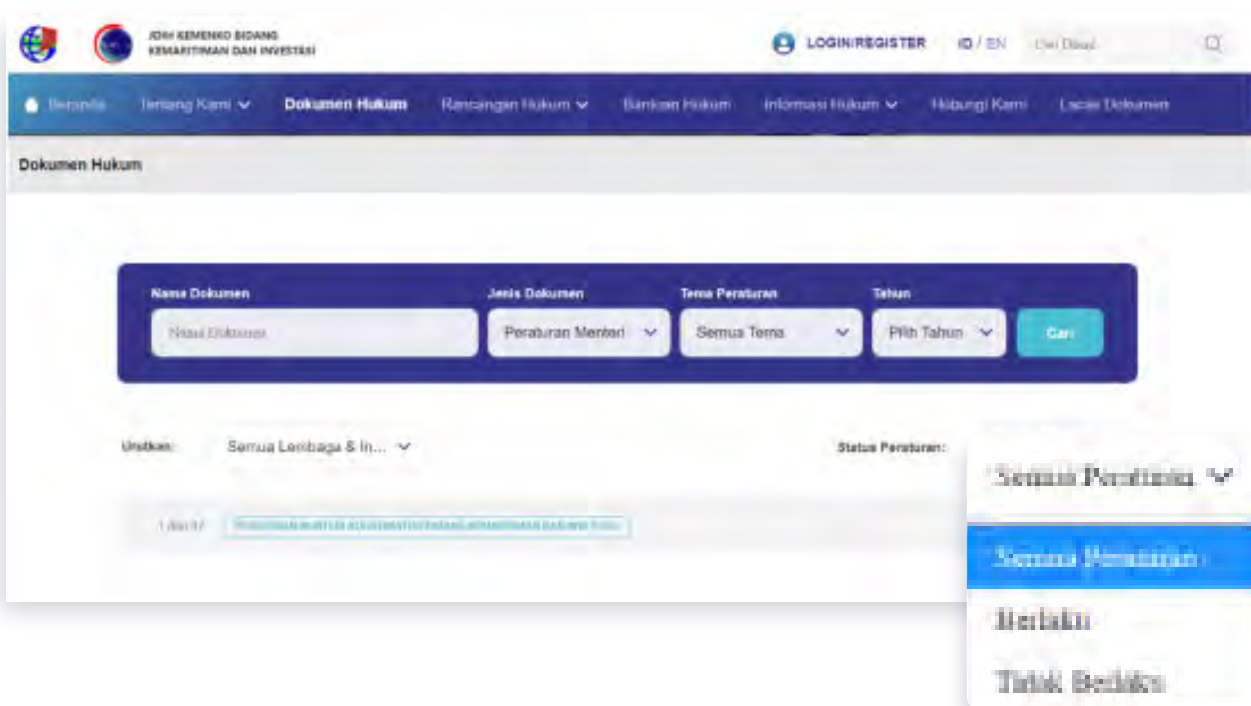
1. Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
2. Kehutanan
3. Panas Bumi
4. Energi
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Perkeretaapian
7. Pelayaran
8. Penerbangan
9. Ketenagalistrikan
10. Pertambangan Mineral dan Batubara
11. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. Pengelolaan Sampah
13. Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
14. Sumber Daya Air
15. Jasa Konstruksi
16. Perumahan dan Kawasan Pemukiman
17. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
18. Kelautan
19. Perikanan
20. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
21. Ketenagakerjaan



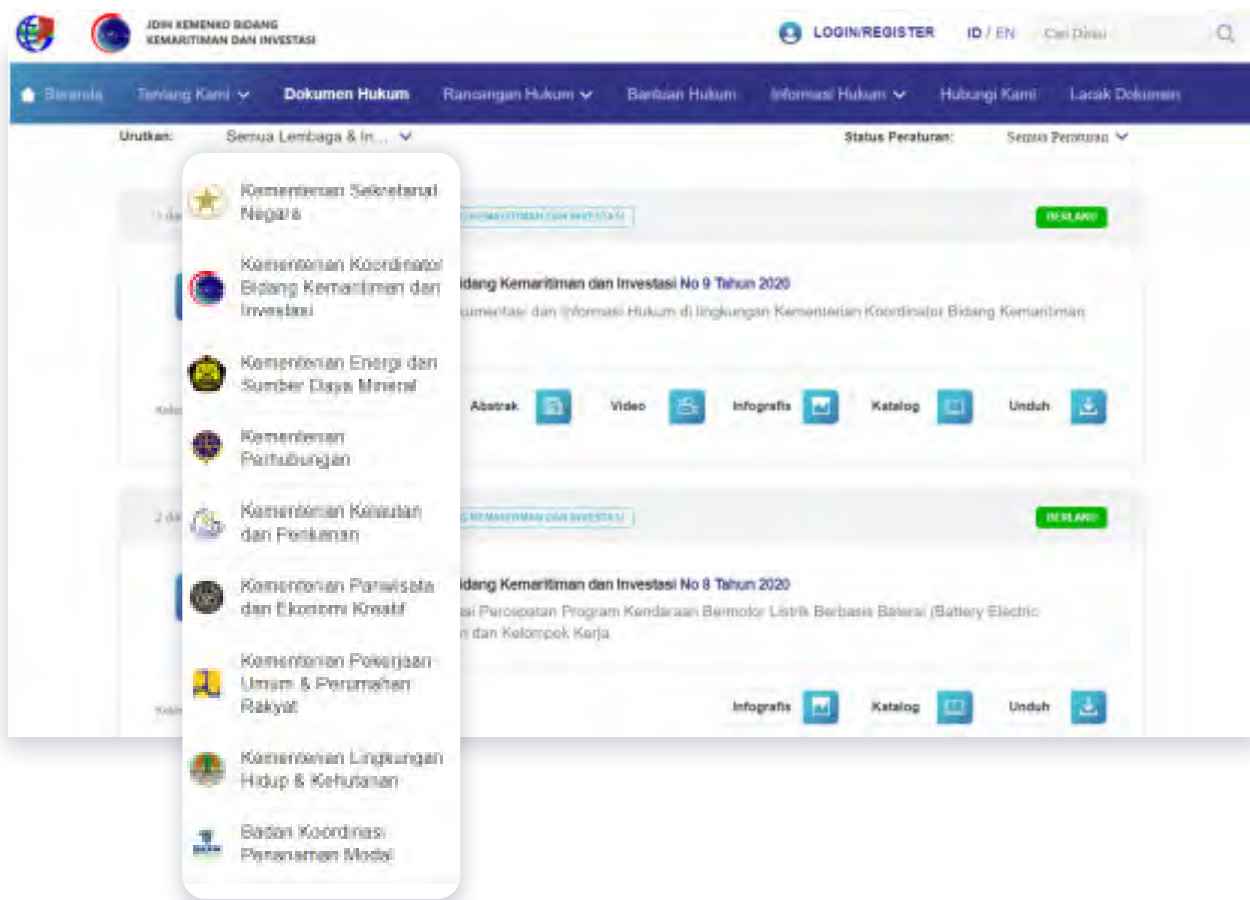
Untuk memperkecil area pencarian, JDIH Marves juga memberikan pencarian berdasarkan tahun yang dibutuhkan sehingga dapat mengetahui ketersediaan peraturan pada tahun tahun tertentu



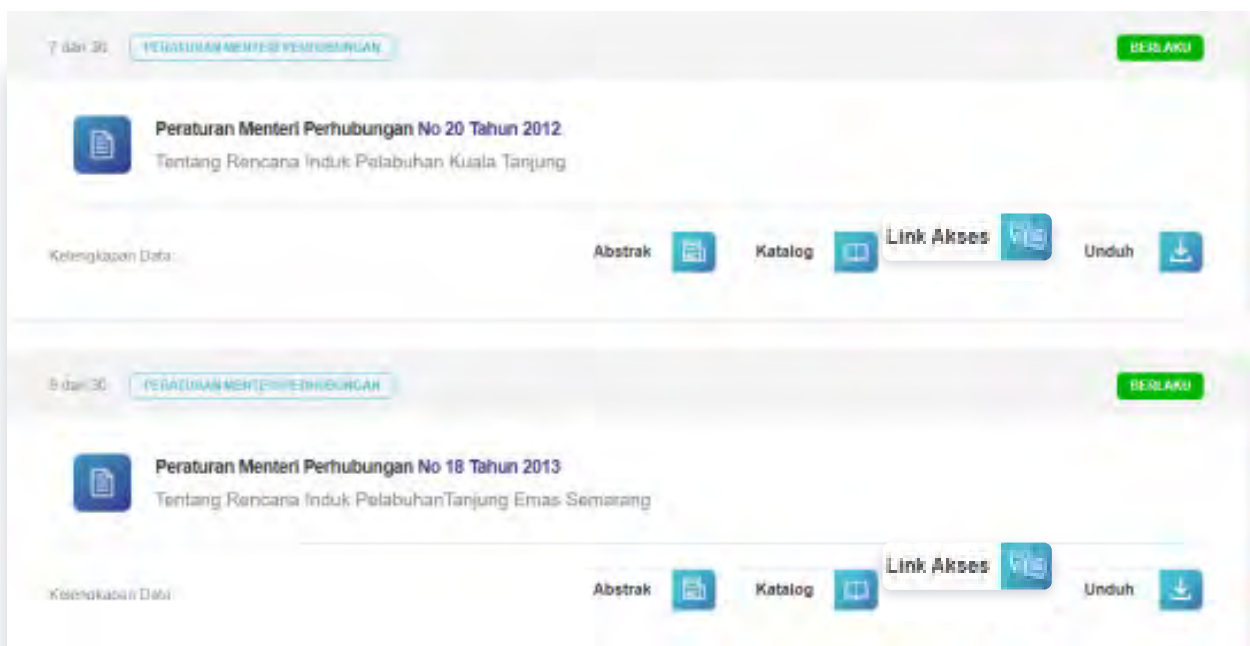
Untuk memperkecil area pencarian juga, JDIH Marves memberikan pencarian berdasarkan status peraturan, yaitu berlaku dan tidak berlaku, sehingga pencari dokumen dapat mencari berdasarkan dokumen yang berlaku saja atau yang tidak berlaku saja



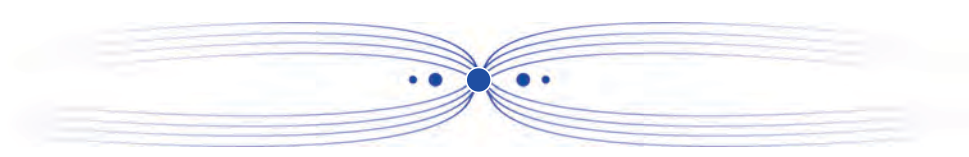
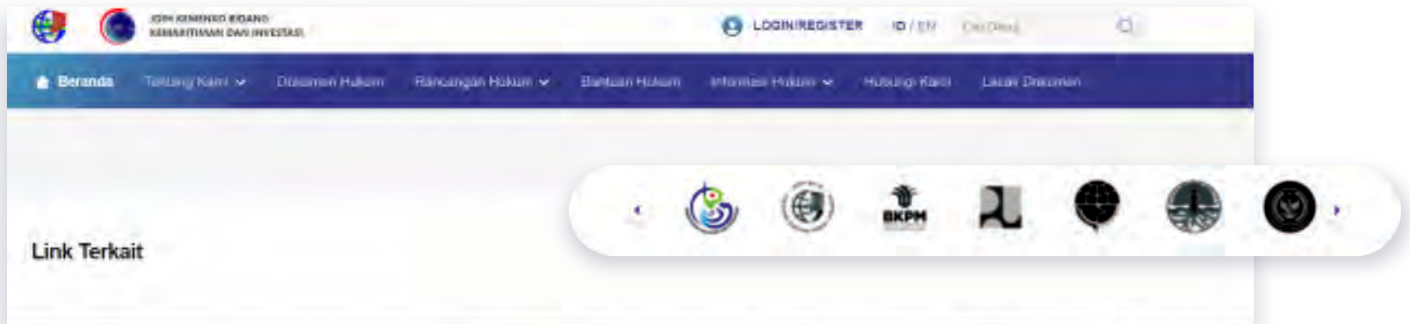
JDIH Marves juga menyediakan pencarian peraturan berdasarkan 7 kementerian/ lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves, yang bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian peraturan kementerian teknis yang masuk dalam tema-tema peraturan.



Untuk memberikan kemudahan terhubung langsung dengan peraturan pada 7 (tujuh) JDIH kementerian/ lembaga, JDIH Marves juga memberikan link akses ke peraturan JDIH pada 7 (tujuh) kementerian/ lembaga.

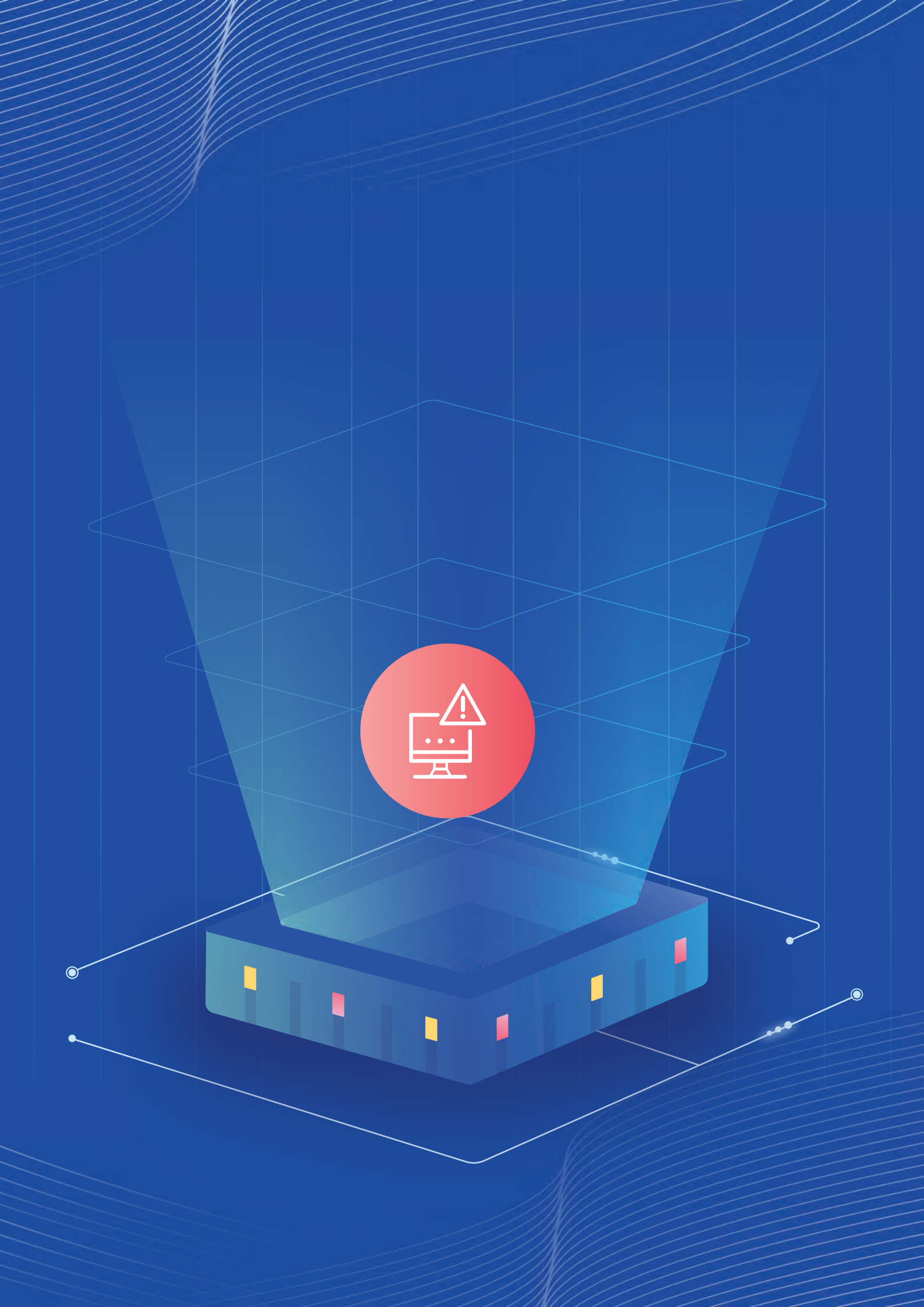


Dan jika pencari informasi ingin mencari lebih detail peraturan pada 7 (tujuh) kementerian/lembaga yang di koordinasikan oleh Kemenko Marves, JDIH Marves menyediakan link akses yang dapat langsung menuju ke 7 (tujuh) JDIH kementerian/lembaga dalam koordinasi Kemenko Marves.



Unduh Aplikasi
JDIH MARVES
Pada Smartphone Kamu





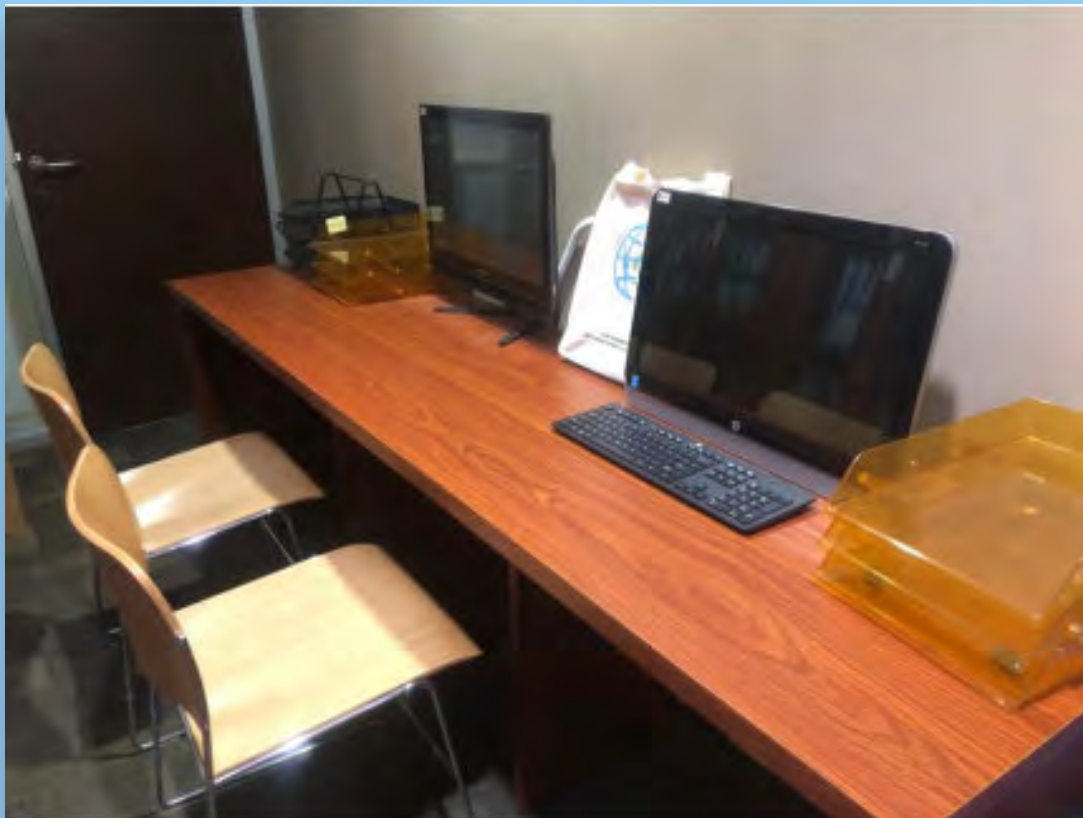


SARANA PRASARANA

Untuk penunjang pengelolaan dokumen dan informasi hukum

Untuk menunjang kinerja anggota JDIH Marves dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum JDIH Marves telah menyediakan, antara lain:

a. Ruang baca



b. Ruang kerja,



c. Ruang penyimpanan koleksi



d. Printer,



e. Scanner,

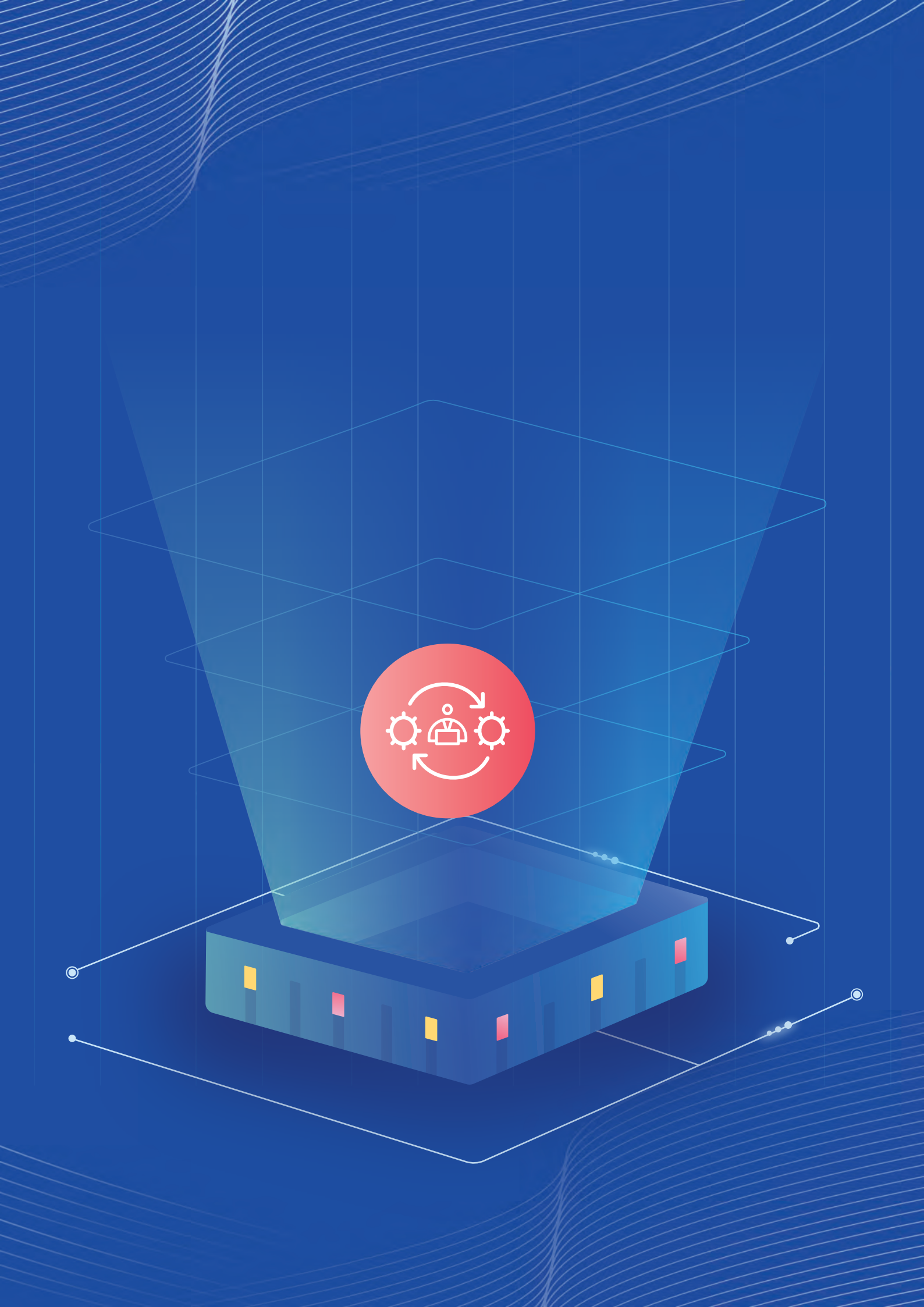


f. Mesin foto copy



Sarana Prasarana







KEGIATAN PENGELOLAAN JDIH

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pengelolaan JDIH dalam rangka memperkuat dan mengembangkan pengelolaan JDIHN serta koordinasi kerja sama dengan pusat JDIHN maupun sesama anggota JDIHN

Kegiatan yang dilaksanakan JDIH Marves dalam rangka memperkuat dan mengembangkan pengelolaan JDIHN dengan pusat JDIHN maupun anggota JDIHN, sebagai berikut:

1. Rapat Pengembangan Website JDIH Kemenko Marves pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2021 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



2. Pemaparan calon pengembang Website JDIH Kemenko Marves oleh Web Architect Technology (WEBARQ) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2021 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



3. Kunjungan ke Perpustakaan BPHN pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2021 di Perpustakaan BPHN Kementerian Hukum dan HAM



4. Rapat Sounding Market dalam rangka Pengadaan Website JDIH Kemenko Marves pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2021 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



5. Rapat Persiapan Pengadaan Website dan Pembangunan Aplikasi JDIH Kemenko Marves pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2021 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



6. Rapat Kick Off Meeting Pengadaan Website dan Pembangunan Aplikasi JDIH Kemenko Marves pada hari Senin tanggal 15 Juni 2021 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



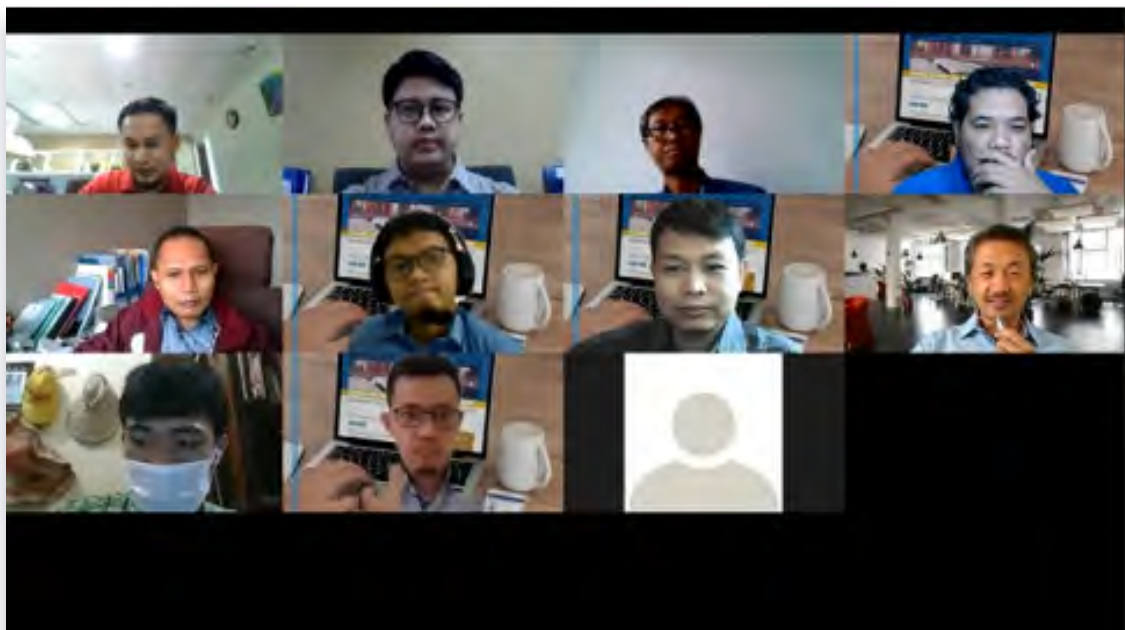
7. Rapat Penguatan Penyampaian Informasi Hukum melalui Media Sosial pada hari Senin tanggal 22 Juni 2021 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



- Rapat Penyampaian Mockup Homepage Website JDIH Kemenko Marves pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2021 di Ruang Rapat Lt. 21 Kemenko Marves



- Rapat studi banding dengan melihat inovasi Biro Hukum Kementerian Keuangan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2021 melalui Zoom Meeting



10. Rapat saran dan tanggapan atas konsep website JDIH Marves pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2021 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



11. Rapat progres dan percepatan pengembangan website dan aplikasi mobile JDIH Marves pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2021 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



12. Menerima pemberian buku-buku hukum dari Perpustakaan BPHN pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2021 di BPHN Kementerian Hukum dan HAM



13. Rapat integrasi JDIH Marves dengan JDIH di 7 Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2021 di Ruang Rapat Phinisi Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves



14. Bimbingan Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada hari Kamis tanggal 24 September 2021 di Harris Hotel and Convention Bekasi



15. Soft Launching Website JDIH Kemenko Marves pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2021 melalui Zoom Meeting



16. Grand Launching Website JDIH Kemenko Marves pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2021 di Hotel Grand Inna Yogyakarta



17. Rapat Teknis Penyusunan Katalog, Nomor Panggil Buku dan Pembuatan Label Buku

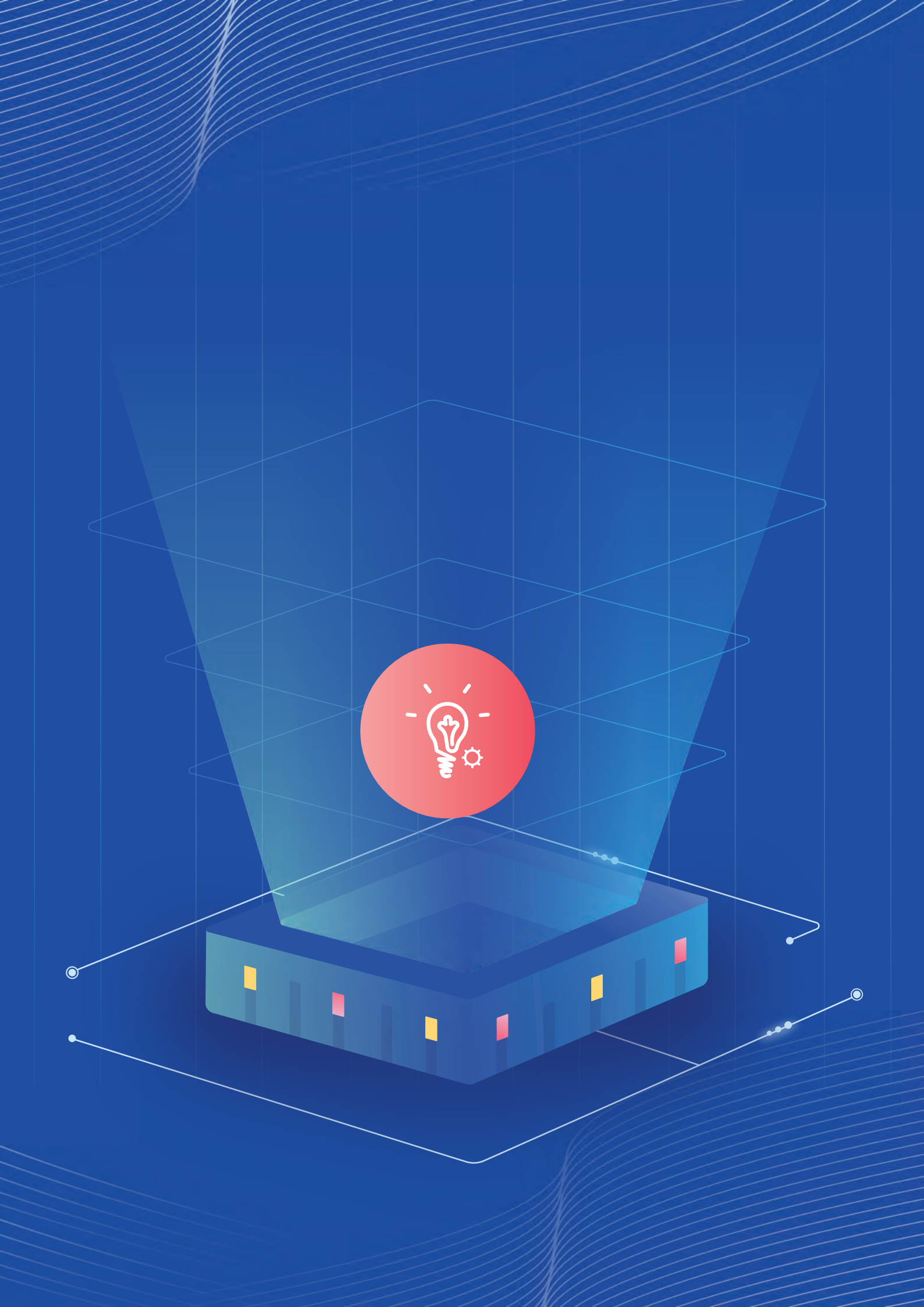


18. Bimtek Penyusunan Laporan Tahunan JDIH Marves



PENGELOLAAN JDIH







INOVASI PENGELOLAAN JDIH

Inovasi yang dilaksanakan pengelolaan JDIH dalam rangka memperkuat dan mengembangkan pengelolaan JDIHN serta koordinasi kerja sama dengan pusat JDIHN maupun sesama anggota JDIHN

Inovasi yang dilaksanakan JDIH Marves dalam rangka memperkuat dan mengembangkan pengelolaan JDIHN dengan pusat JDIHN maupun anggota JDIHN, menjadikan JDIH Marves sebagai one stop service pelayanan informasi hukum yaitu JDIH tidak hanya menyampaikan dokumen hukum yang telah ditetapkan dan diundangkan tetapi menyajikan informasi suatu peraturan perundang-undangan dari sejak tahap usulan, pembahasan, monitor proses penyelesaian (tracking proses), evaluasi peraturan, penyebarluasan dokumen hukum, dan fasilitas layanan bantuan hukum kepada para Pegawai di lingkungan Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi serta JDIH Marves dapat di download melalui play store dan app store.

a. Rancangan Hukum

Fitur Rancangan Hukum merupakan fitur yang berfungsi untuk menyiapkan rancangan suatu peraturan perundang-undangan dari mulai usulan, rancangan, pembahasan, dan tracking proses usulan rancangan peraturan perundang-undangan.

The screenshot displays the website interface for JDIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI. The header includes the logo, navigation links (Beranda, Tentang Kami, Dokumen Hukum, Rancangan Hukum, Bantuan Hukum, Informasi Hukum, Hubungi Kami, Lacak Dokumen), and user options (LOGIN/REGISTER, ID / EN, Cari Data). The main content area features a search bar and a dropdown menu for 'Rancangan Hukum' with options: Usulan, Project, PDMK, Peraturan Bidang Maritim Investasi, Evaluasi Hukum, and Naskah Hukum. Below this, the 'Peraturan Terbaru' section highlights two recent regulations: 'Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi No 9 Tahun 2020' and 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2020'.

Usulan rancangan peraturan perundang-undangan yang masuk ke Biro Hukum akan di input ke dalam sistem yang disebut usulan. Untuk kemudian usulan tersebut akan dilakukan analisa dan dievaluasi untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan.

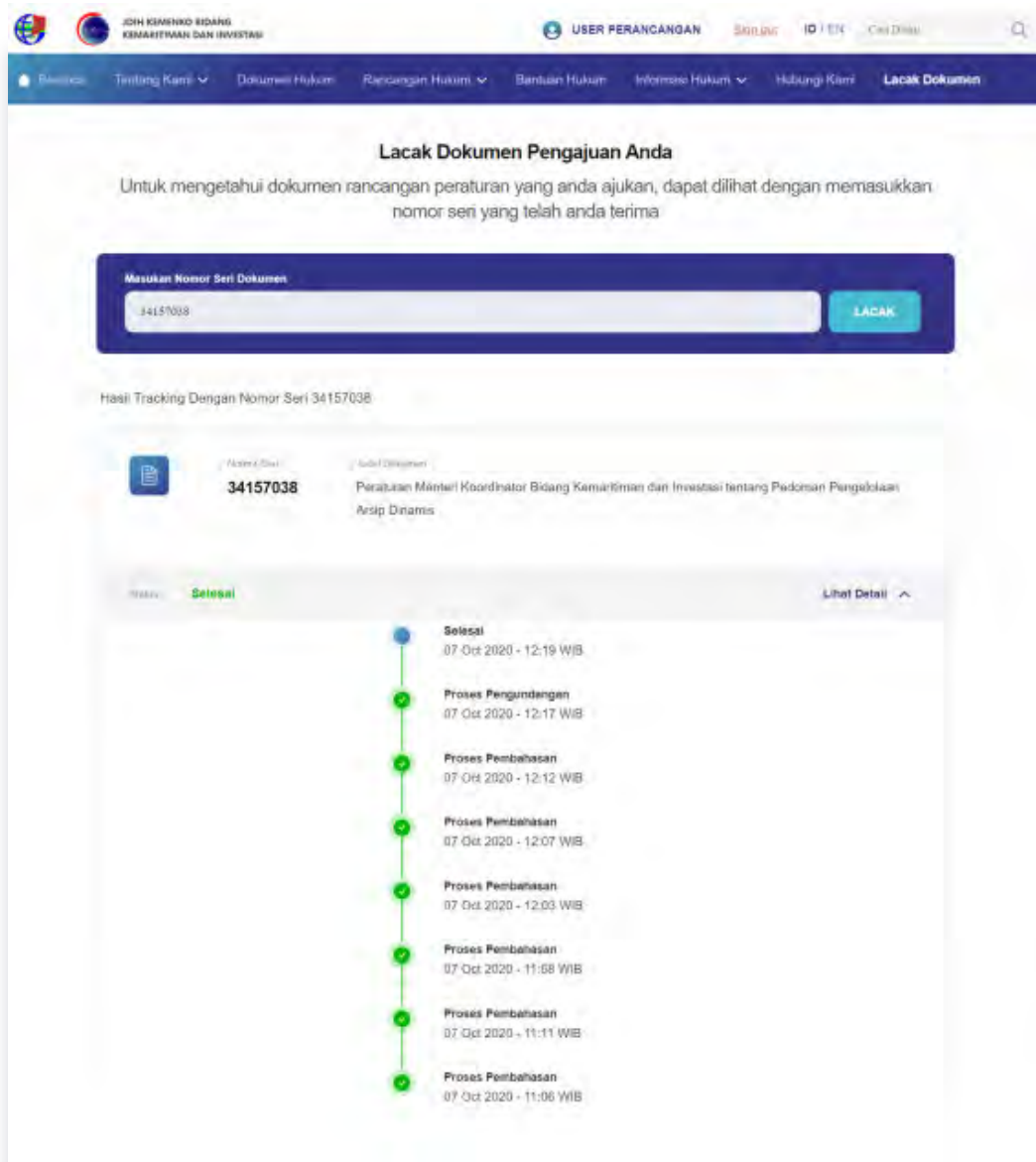
No	Nomor Project	Nama Project	Kategori	Tanggal Usulan	Status
1	34157053	Keputusan Menko tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Koordinator tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Menteri Non TNI	Naskah Hukum	20 May 2020	Menunggu Review
2	34157052	Keputusan Menko tentang Kelompok Kerja Bidang Sumber Daya Maritim	Naskah Hukum	09 Apr 2020	Menunggu Review
3	34157051	Keputusan Menko tentang Pokja Peringkatan Produksi Industri Undang Nasional	Naskah Hukum	08 Apr 2020	Menunggu Review
4	34157050	Keputusan Menko tentang Tim Kelompok Kerja Percepatan Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2019	Naskah Hukum	30 Mar 2020	Menunggu Review
5	34157049	Keputusan KPA tentang Perubahan Ketiga KPA tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak Administrasi Kemendagri Marves nestrasi Nomenklatur Baru	Naskah Hukum	18 May 2020	Menunggu Review

setelah dilakukan analisis dan evaluasi untuk kemudian akan di verifikasi untuk diproses lanjut atau ditolak untuk dilengkapi kekurangan yang ada. Selanjutnya usulan yang disetujui untuk diproses akan masuk ke sistem yang disebut project. Di project ini akan terinformasikan nomor usulan yang dapat digunakan pada saat akan melakukan tracking proses usulan rancangan peraturan dan di project juga dapat terlihat semua status rancangan peraturan yang diajukan.

No	Nomor Project	Nama Project	Kategori	Tgl Usulan	Target Penyelesaian	Status
1	34157063	Rancangan Kepresmenko tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 Unit Eselon II Inklusif Setmenko	Naskah Hukum	09 Nov 2020	09 Dec 2020	Usulan Diproses
2	34157062	Draft Surat Keputusan Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan SPBE	Naskah Hukum	05 Nov 2020	05 Dec 2020	Usulan Diproses
3	34157061	Rancangan Surat Edaran Sosmenko Marves tentang Podoman Pelaksanaan	Naskah Hukum	11 Nov 2020	11 Nov 2020	Proses Penawaran

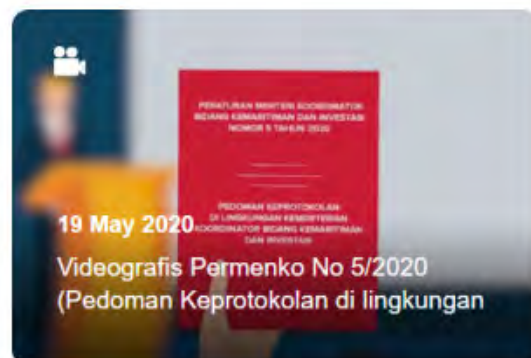
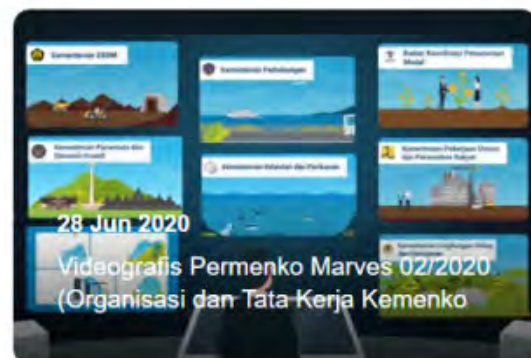
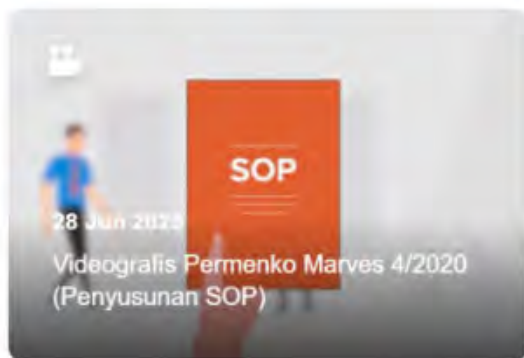
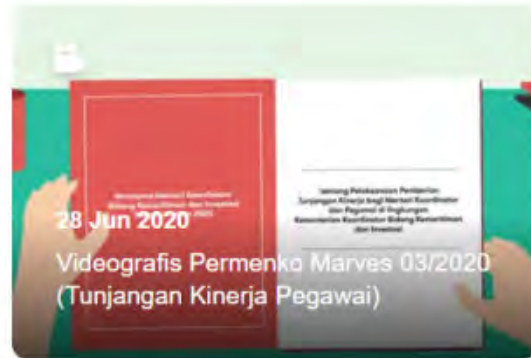
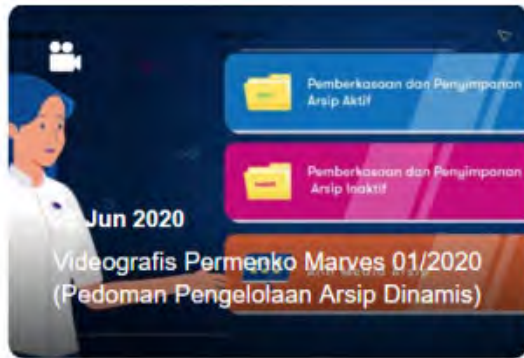
Dari usulan yang telah diterima selanjutnya akan di proses sesuai dengan jenis usulannya antara lain: 1) peraturan di bidang kemaritiman dan investasi; 2) peraturan menteri koordinator; 3) naskah hukum; dan 4) evaluasi hukum. Usulan tersebut selanjutnya dapat di lihat perkembangannya di sistem tracking proses.

Tracking proses merupakan fitur yang berfungsi untuk memberi informasi status perkembangan dari usulan yang disampaikan kepada Biro Hukum. Dari fitur tersebut si pemberi usulan cukup memasukkan nomor usulan yang diberikan Biro Hukum yang dapat diakses melalui website JDIH dengan memasukkan nomor seri yang telah diberikan Biro Hukum, dari situ sudah dapat langsung mengetahui sejauh mana proses usulannya.



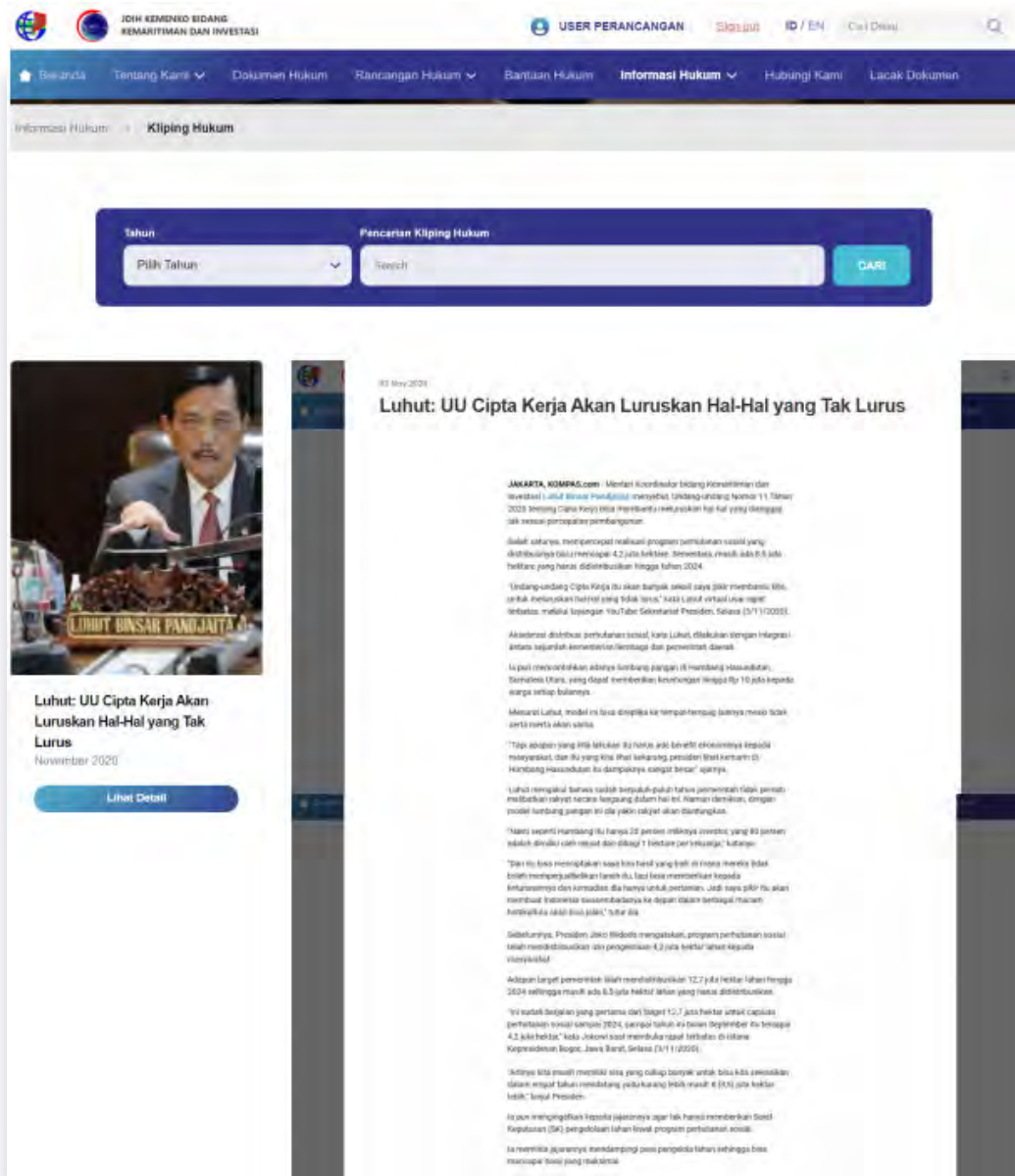
b. Informasi Hukum

Untuk memberikan kemudahan seseorang dalam memahami isi suatu regulasi JDIH Marves melakukan suatu inovasi yaitu menyajikan peraturan ke dalam bentuk videografis dan informasi grafis peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap peraturan yang ada. Saat ini sudah ada 12 (dua belas) peraturan yang sudah disajikan dalam bentuk videografis dan sudah ada 20 (dua puluh) peraturan yang disajikan dalam bentuk informasi grafis.



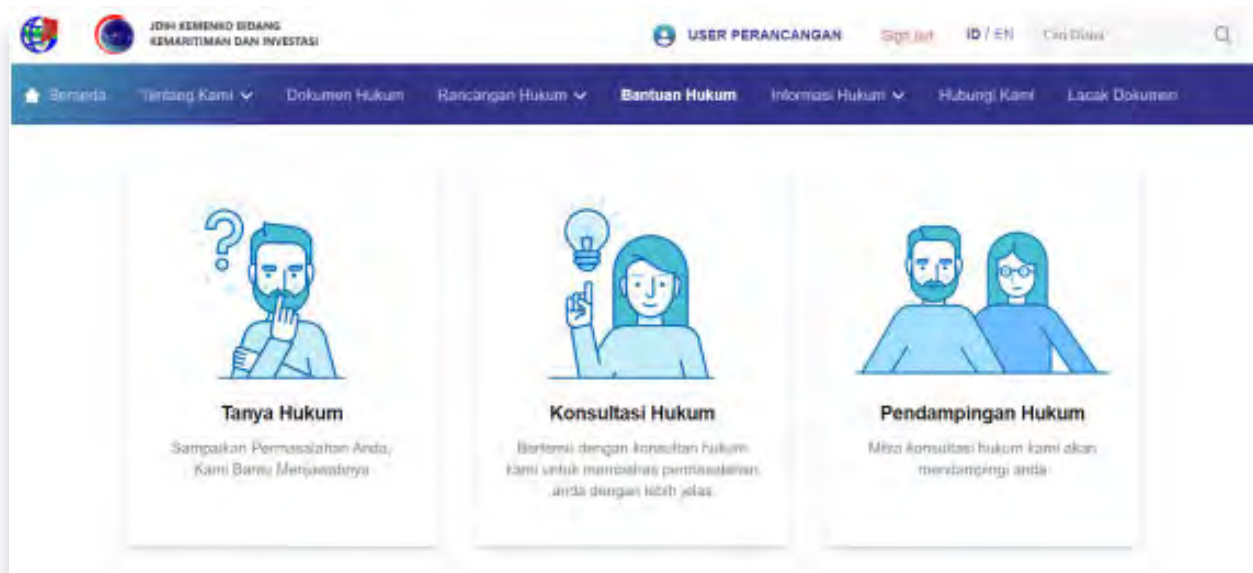
Untuk memberikan informasi atas isu-isu regulasi di bidang kemaritiman dan investasi, JDIH Marves juga melakukan inovasi dengan mengubah klipng hukum yang sebelumnya masih bersifat manual, yaitu dengan menggunakan koran, majalah, atau surat kabar yang di gunting-gunting dan ditempel di atas kertas, saat ini klipng hukum di JDIH Marves sudah merubahnya dengan sistem elektronik.

Elektronik Kliping Hukum atau biasa disebut e-kliping, merupakan kliping yang disajikan dengan sistem yang cukup dengan sistem crop dan cukup dengan melakukan upload file yang ingin disajikan sudah bisa di sajikan kepada para pembaca secara online.

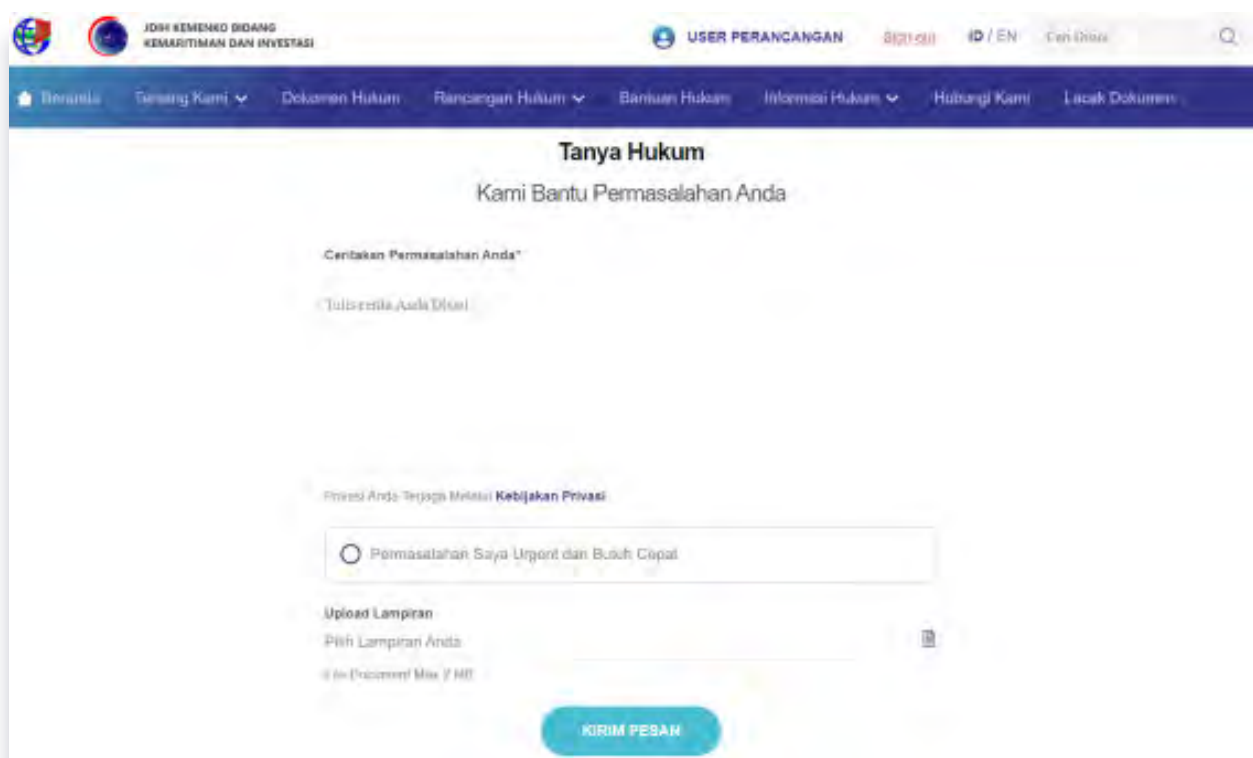


c. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum ini disediakan untuk mengajukan permasalahan hukum yang dihadapi dan diperuntukan hanya kepada pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Fasilitas yang ada pada fitur bantuan hukum yaitu tanya hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum. Fitur ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan bagi yang mengajukan permasalahan hukum



Tanya hukum merupakan fitur yang disediakan bagi seseorang yang ingin menanyakan permasalahan hukum yang dialami tanpa perlu bertemu, cukup dengan mengirimkan pertanyaan seputar permasalahan hukum kemudian nanti akan di jawab secara email oleh konsultan hukum.



Fitur yang berikutnya Konsultasi Hukum merupakan fitur yang disediakan bagi seseorang yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan konsultan hukum. Fitur ini dapat membuat janji konsultasi dengan mengatur atau membuat janji kapan waktunya ingin berkonsultasi.

Buat Janji Konsultasi
Bantu kami pahami masalah Anda

Durasi Konsultasi*
 30 Menit 60 Menit 90 Menit

Pilih Jadwal Konsultasi*
 Pilih Jadwal Konsultasi Pagi (09:00 - 11:00)

Saya ingin Menceritakan Permasalahannya Saya

Ceritakan Permasalahan Anda*

Tulis cerita Anda disini

Privasi Anda Terasa Aman? [Kebijakan Privasi](#)

BUAT JANJI

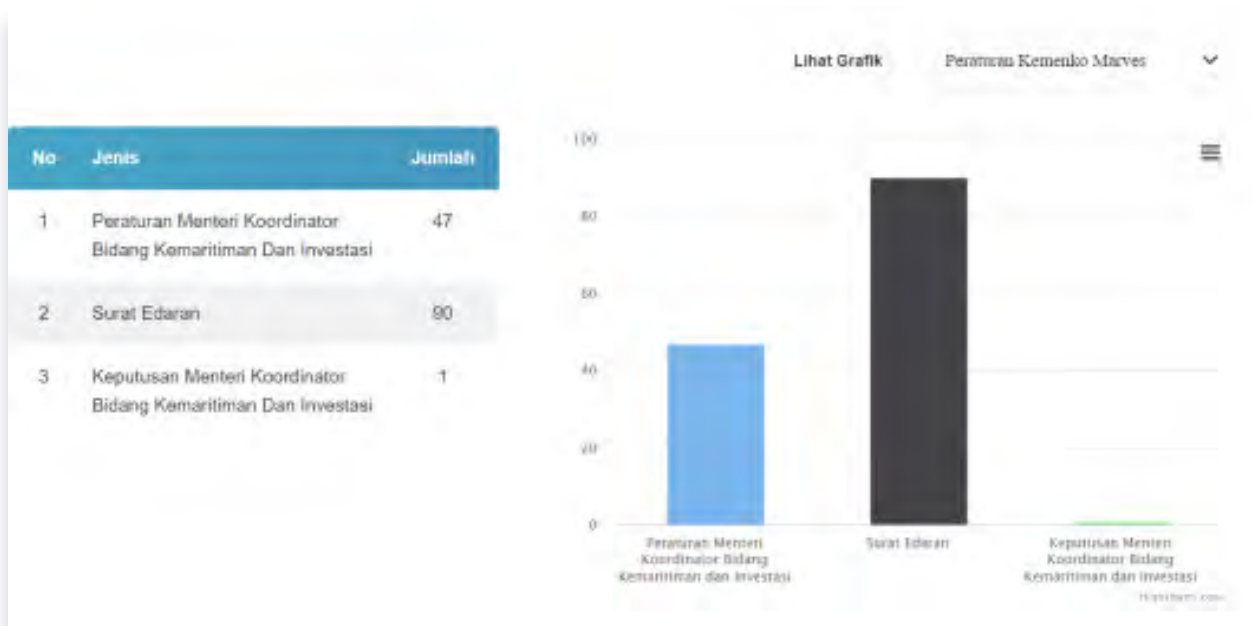
d. Grafik Peraturan

Grafik Peraturan merupakan fitur yang disediakan untuk memberikan informasi grafik jumlah dokumen dan informasi hukum serta juga untuk memberikan informasi status peraturan. Grafik yang disediakan di dalam fitur ini sebagai berikut:

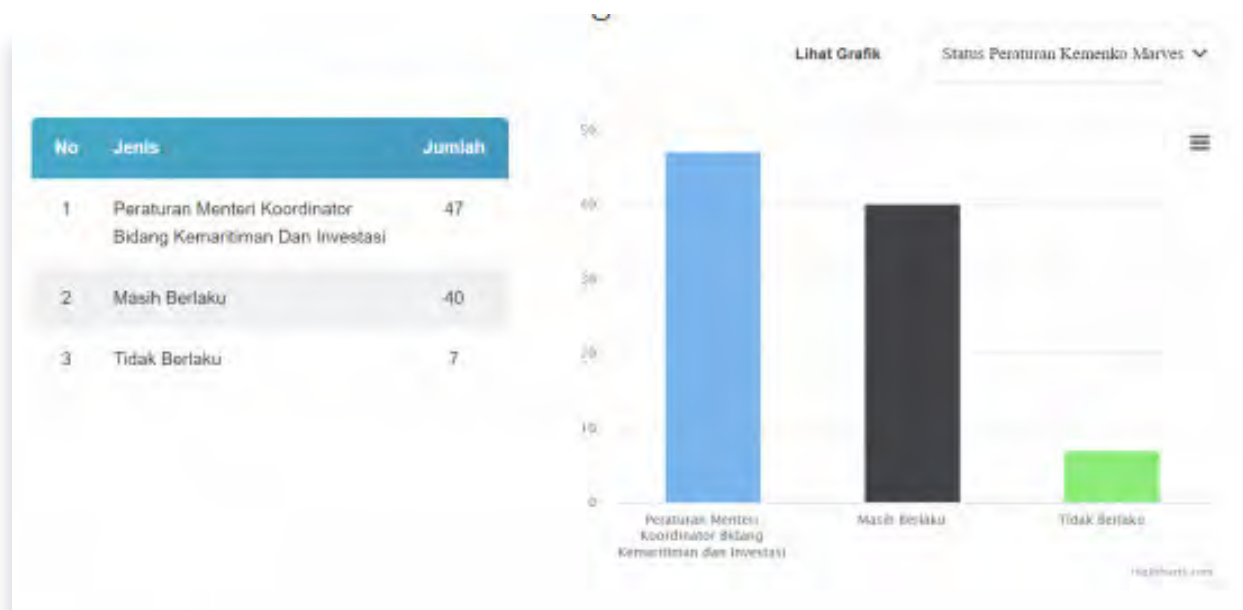
1. Grafik Peraturan tingkat Pusat



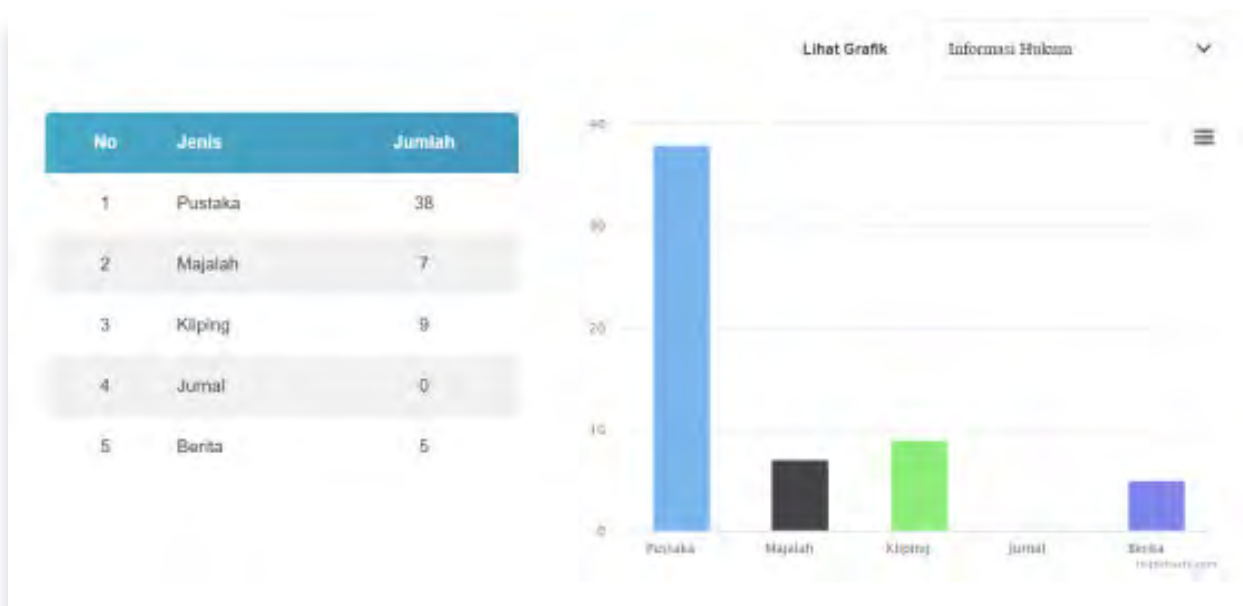
2. Grafik Peraturan di lingkungan Kemenko Marves



3. Grafik Status Peraturan Menko Bidang Marves

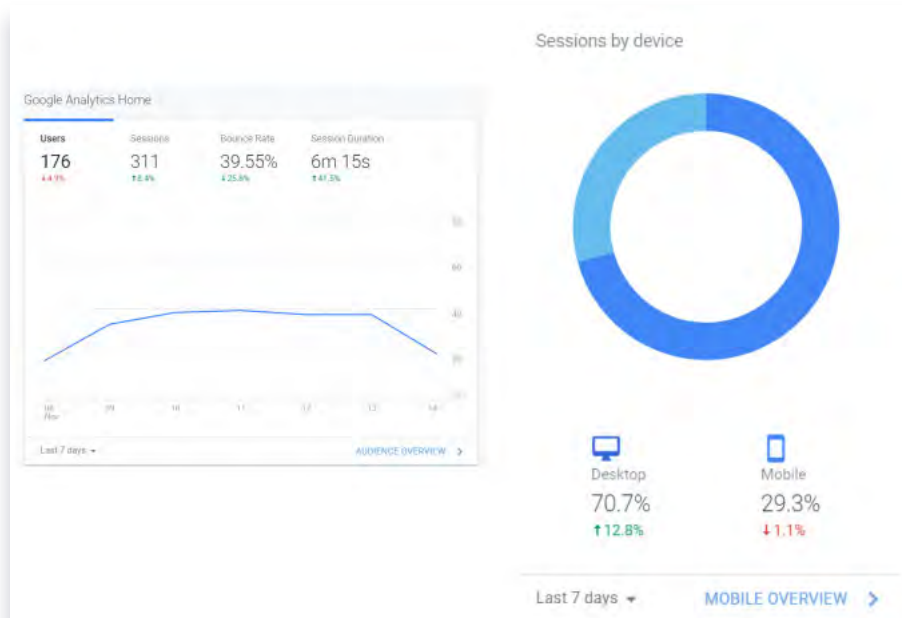


4. Grafik Status Informasi Hukum



e. Google Analytic

JDIH Marves telah difasilitasi google analytics yang berfungsi memantau trafik web, data soal performa sebuah situs mulai dari sumber trafik, data demografi pengunjung, konten populer dan lain-lain. Semua data tersebut dijadikan bahan evaluasi dan analisis dari situs web.



f. JDIH Aplikasi Mobile

Aplikasi Mobile JDIH Marves dengan UI/UX, memiliki fitur-fitur yang memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen hukum dan dengan Aplikasi Mobile menyajikan notifikasi jika ada peraturan terbaru



Peraturan baru yang telah di upload di JDIH Marves, dengan fasilitasi notifikasi pada handphone



Tersedia beberapa jenis peraturan perundang-undangan



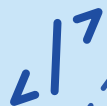
Tersedia beberapa tema peraturan perundang-undangan

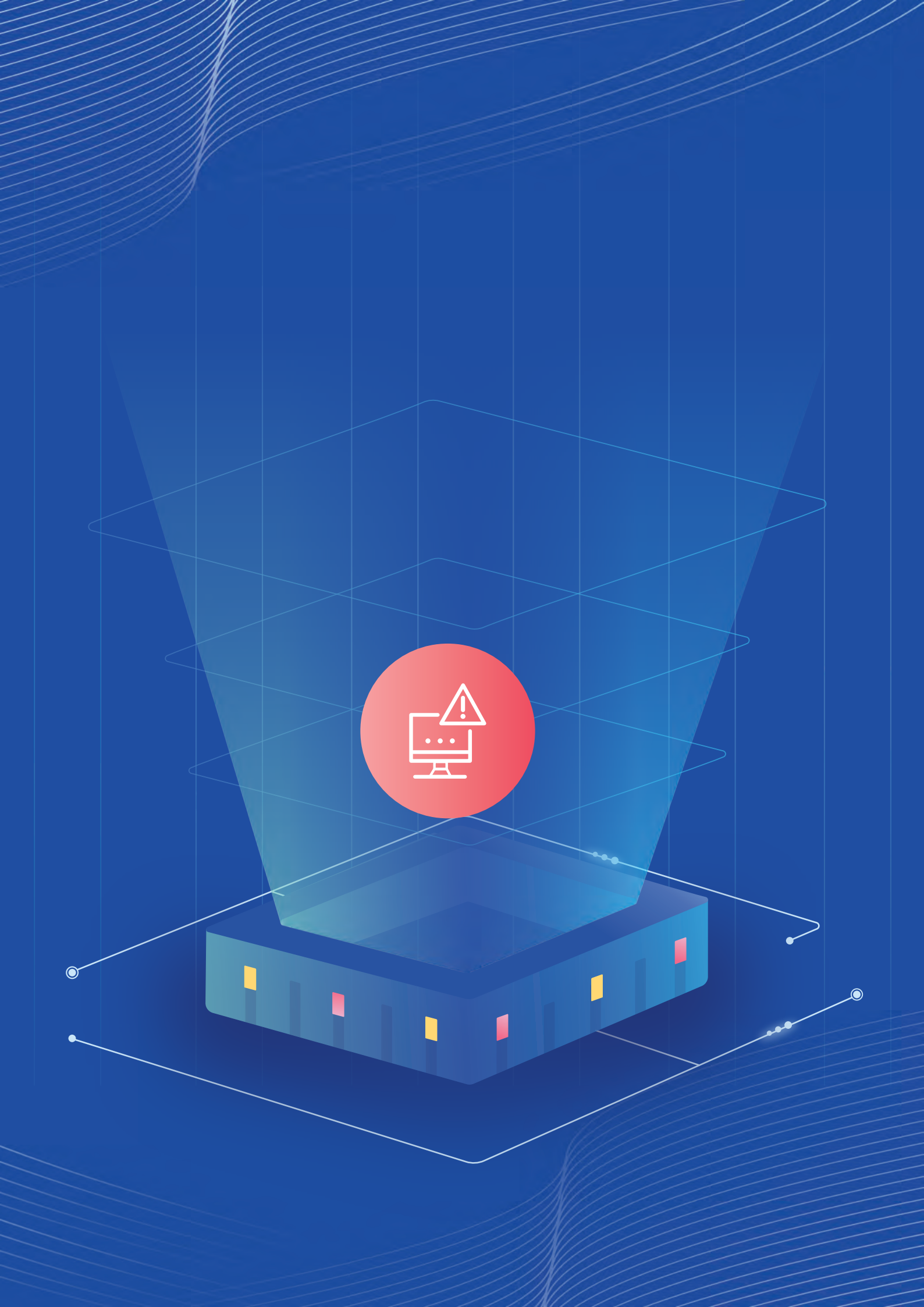


Tersedia informasi hukum seperti buku buku hukum, galery kegiatan, video, infografis dan majalah hukum



PENGELOLAAN APLIKASI DAN WEBSITE JDIH MARVES







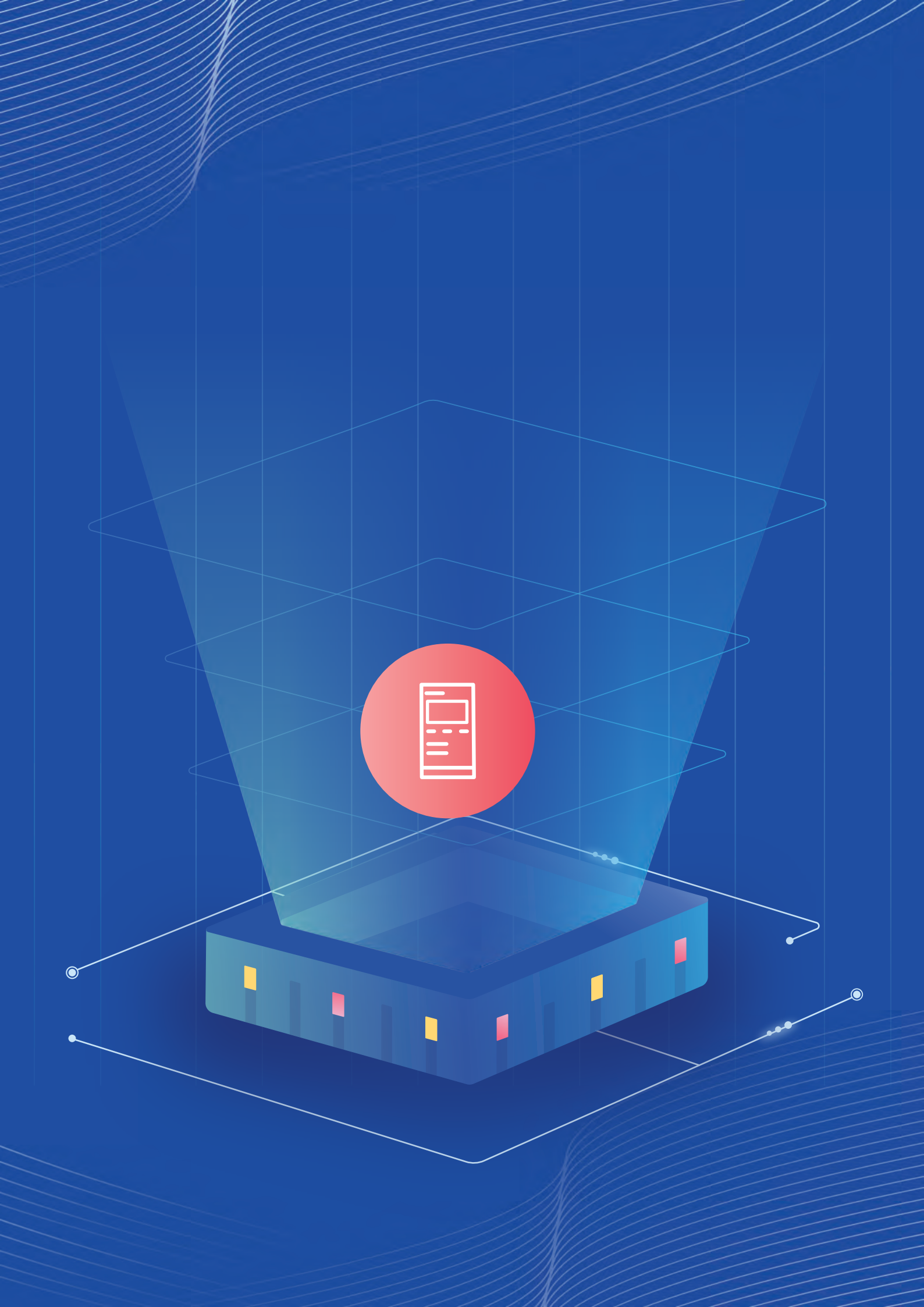
PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH, baik dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan JDIH Marves Tahun 2021, yaitu:

1. Konsep website JDIH Marves yang tidak hanya sebagai situs yang menyajikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan tetapi situs website yang menyampaikan informasi hukum secara komprehensif dari tahap perencanaan rancangan peraturan, pembahasan, tracking proses, dan fasilitas bantuan hukum memiliki kendala dalam hal ini didasari oleh sulitnya meyakinkan masing-masing pemilik tugas dan fungsi untuk bisa difasilitasi proses bisnisnya melalui website JDIH Marves dan adanya keraguan inovasi yang dilakukan JDIH menyalahi aturan standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019 oleh karena itu pada tanggal 7 Juli 2021 di Ruang Rapat Phinis Lt. 5 Biro Hukum Kemenko Marves, Biro Hukum mengadakan rapat saran dan tanggapan atas konsep website JDIH Marves dengan mengundang Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Bapak Yasmon.
2. Proses pengembangan website dan pembuatan aplikasi mobile memiliki kendala dalam hal ini didasari oleh dua pendapat yang berbeda mengenai proses pengadaan barang dan jasa untuk pengembangan website dan pembuatan aplikasi mobile. Sehingga proses pelaksanaan kegiatan yang harusnya dapat dilaksanakan sejak bulan Januari 2021 diundur sampai dengan bulan Juni 2021. Dengan sisa waktu yang tersedia membuat proses pengerjaan harus benar benar sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan mengingat batas tahun anggaran 2021 yaitu tanggal 15 Desember 2021.
3. Proses pengadaan buku-buku hukum memiliki kendala dalam hal ini didasari proses pengadaan buku-buku yang harus melalui Biro Umum karena pengadaan buku buku hukum masuk dalam kategori Belanja Modal yang akan menjadi aset, sehingga proses pengadaannya harus melalui Biro Umum. Sedangkan untuk proses untuk dapat dianggarkan di Biro Umum proses pengajuannya belum dipahami alur pengajuannya.
4. Proses pembuatan kontrak pembuatan videografis dan infografis memiliki kendala dalam hal ini dasari oleh proses penghitungan pembayaran pada setiap hasil videografis dan infografis, karena kegiatan ini merupakan sesuatu yang baru dilakukan dalam proses kontrak di Biro Hukum sehingga sulit untuk menentukan penghitungan pembayarannya.







Fitur JDIH Marves

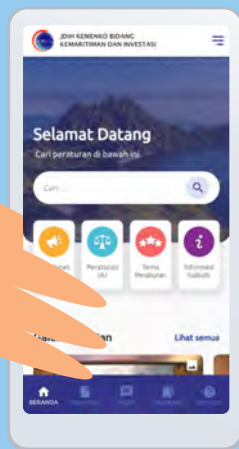
Fitur yang terdapat di dalam JDIH Marves meliputi:

1. Rancangan Hukum

2. Bantuan Hukum

3. Informasi Hukum

4. Lacak Dokumen



1.



Rancangan Hukum:

- a. Usulan;
- b. P3MK;
- c. Peraturan di bidang kemaritiman dan investasi;
- d. Naskah Hukum, Evaluasi Hukum;

2.



Bantuan Hukum:

- a. Tanya Hukum;
- b. Konsultasi Hukum;
- c. Pendampingan Hukum;
- d. Daftar Penelaahan

3.



Informasi Hukum:

- a. Pustaka Hukum;
- b. Majalah Hukum;
- c. Kliping Hukum;
- d. Jurnal Hukum;
- e. Berita Hukum;
- f. Galery;
- g. Infografis;
- h. Kamus Hukum;

4.



Lacak Dokumen

Untuk mengetahui dokumen rancangan peraturan yang anda ajukan

Fitur pengembangan yang dilakukan;

1. Share dokumen dan informasi hukum di Whatsapp, Facebook, Twitter, Email
2. Kamus Hukum
3. Daftar Penelaahan Bantuan Hukum
4. Survey Kepuasan Layanan JDIH Marves
5. Pemanfaatan SEO untuk meningkatkan kemudahan pencarian dokumen dan informasi hukum di mesin pencarian google



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Republik Indonesia